

**EVALUASI MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
DI KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR**

(Studi Pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Situbondo Jawa Timur)

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Perikanan
Pada Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang**

Oleh :

NUR ILMI AGRIFAJARPERTIWI

NIM. 0510840051



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
MALANG
2009**

**EVALUASI MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
DI KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR**

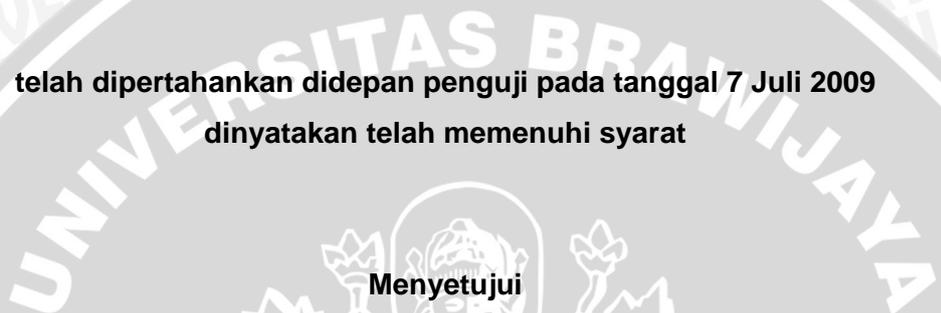
(Studi Pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Situbondo Jawa Timur)

Oleh :

NUR ILMI AGRIFAJARPERTIWI

NIM. 0510840051

telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 7 Juli 2009
dinyatakan telah memenuhi syarat



Menyetujui

Dosen Penguji I

Dosen Pembimbing I

(Ir. MIMIT PRIMYASTANTO, MS)

(Dr. Ir. NUDDIN HARAHAP, MP)

Tanggal :

Tanggal :

Dosen Penguji II

Dosen Pembimbing II

(WAHYU HANDAYANI, S.Pi)

(Dr. Ir. HARSUKO RINIWATI, MP)

Tanggal :

Tanggal :

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

(Dr. Ir. NUDDIN HARAHAP, MP)

Tanggal :



RINGKASAN

NUR ILMI AGRIFAJARPERTIWI, Laporan Skripsi tentang Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Di bawah bimbingan **Dr. Ir. NUDDIN HARAHAP, MP** dan **Dr. Ir. HARSUKO RINIWATI, MP**.

Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki, sudah selayaknya pembangunan pada sektor tersebut dikembangkan agar dapat mendukung pembangunan secara nasional khususnya dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. Berdasarkan pada potensi sumberdaya yang ada, maka pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Situbondo mengusahakan potensi kelautan dan perikanan menjadi berbagai kegiatan ekonomi yang perlu dipacu melalui peningkatan investasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu memberikan sumbangan yang lebih besar pada upaya Pembangunan Nasional dan Pembangunan di Situbondo.

Dalam rangka menciptakan Pembangunan di wilayah Situbondo ini, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan. Dimana pemberdayaan ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Sejalan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja model pemberdayaan yang dilakukan dan apakah pemberdayaan masyarakat nelayan yang dijalankan oleh Pemerintah Situbondo khususnya dinas terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut telah berjalan secara optimal? Serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari program itu. Dari uraian tersebut, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Apa dan bagaimana model pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Situbondo? (2) Bagaimana evaluasi program pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan? (3) Bagaimana tingkat pemberdayaan masyarakat nelayan dilihat dari motivasi, kesejahteraan dan partisipasi? Dan (4) Bagaimana model pemberdayaan yang sesuai masyarakat nelayan?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis model pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP); mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat nelayan (Proses penilaian yang sistematis (pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan adanya perubahan), Pengumpulan bukti-bukti yang cukup terhadap adanya perubahan sebagai dampak program pemberdayaan, mengumpulkan informasi sebagai alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan); tingkat pemberdayaan masyarakat nelayan (motivasi, kesejahteraan dan partisipasi) serta merumuskan model pemberdayaan yang sesuai masyarakat nelayan.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada bulan Februari-Maret 2009. Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek adalah masyarakat nelayan. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung seperti keadaan umum lokasi penelitian, meliputi letak geografis, keadaan perikanan,

pedoman umum PEMP serta Profil Pogram PEMP. Untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pengambilan sampel dengan menggunakan *Sampel bertujuan* atau *Purposive sample* dalam 2 (dua) tahap.

Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada evaluasi terhadap Program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan beberapa tahap yaitu (1) sasaran Program PEMP; (2) pendekatan program; (3) prinsip pengelolaan dan pengembangan; dan (4) pendampingan.

Sasaran yang dilakukan telah sesuai yaitu koperasi LEPPM3 sebagai sasaran antara dan masyarakat nelayan sebagai sasaran akhir. Untuk pendekatan program, patisipasi dan kemitraan yang diinginkan telah sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Sedangkan kemandirian yang diinginkan belum sepenuhnya terbentuk. Masyarakat masih belum mampu menjalankan program dengan baik dan masih saja bergantung pada tengkulak. Dari prinsip pengelolaan dan pengembangan, ada beberapa prinsip yang dilakukan yaitu: Acceptable, Transparency, Accuntability, Responsiveness, Qick disbursement, Democracy, Sustainability, Equality dan Competiiviness. Dari prinsip pengembangan tersebut, tidak semua prinsip bejalan sesuai dengan yang diinginkan. Hanya transparency, democracy, equality yang berjalan sesuai yang diinginkan. Sedangkan untuk pendampingan, peran pendamping dalam program ini tidak dilakukan.

Selain dari 4 tahap tersebut, penilaian program juga dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak DKP dan kepada masyarakat nelayan terhadap program PEMP serta dampak yang ditimbulkan. Dari wawancara yang dilakukan diperoleh bahwa pada intinya program ini tidak berjalan lancar. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata model pemberdayaan yang diberikan hanya pada pinjaman modal dan SPDN (*Solar Packed Dealear Untuk Nelayan*) yang itupun hanya beberapa lokasi saja yang menerima dan berjalan lancar. Akan tetapi pinjaman modal dari program PEMP tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar. Ini disebabkan karena ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut diantaranya pada sosialisasi program PEMP tentang pinjaman modal yang membuat masyarakat nelayan tidak mengembalikan pinjaman dana tersebut dan kepengurusan LEPPM3 yang kurang baik dalam menjalankan program PEMP. Seperti kurang tegasnya pihak LEPPM3 mengenai administrasi dalam pengembalian dana. Begitu pula pada pembangunan Solar Packed Dealer yang direncanakan ternyata tidak berjalan lancar. Ini disebabkan karena takaran solar per liter di POM Mini sedikit lebih rendah dibanding solar per liter di POM Umum. Model yang digunakan juga tidak disertakan pendampingan dan pengawasan.

Selain itu, penilaian ini dilakukan pada tingkat pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilihat berdasarkan Respon masyarakat tentang program PEMP, motivasi, kesejahteraan serta partisipasi masyarakat. Dari hasil yang didapat untuk variabel pertama tentang respon masyarakat terhadap Program PEMP yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pada intinya 49 orang (90%) masyarakat nelayan mengetahui adanya Program tersebut dan 54 orang (100%) masyarakat senang dengan dilaksanakannya Program PEMP tersebut. Akan tetapi sebagian besar (>74%) masyarakat mengatakan bahwa program itu tidak berjalan baik dan tidak berdampak baik bagi kesejahteraan nelayan. Sedangkan untuk motivasi, dinilai dari keterlibatan dalam suatu organisasi dan lamanya jam kerja masyarakat yang dilakukan. Pada nilai motivasi ini, 54 orang (100%) masyarakat bekerja tidak sesuai dengan jam kerja biasanya (8 jam/hari). Karena lamanya kerja tergantung pada hasil tangkapan

yang diperoleh. Untuk motivasi dalam berorganisasi, masyarakat kurang begitu mengenal tentang organisasi dan 100% masyarakat tidak ada yang mengikuti suatu organisasi ataupun kepengurusan dalam organisasi. Sehingga menunjukkan bahwa program tersebut tidak berpengaruh terhadap motivasi masyarakat.

Program ini juga tidak memberikan manfaat secara optimal pada kesejahteraan masyarakat nelayan yaitu pada tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan dan akses. Pendapatan nelayan didapat dari hasil melaut bukan karena pinjaman dana yang diberikan. Sebanyak 48 orang (88,8%) masyarakat menilai Program PEMP tidak berpengaruh pada pendapatan, pendidikan, kesehatan maupun akses. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini tidak mempengaruhi pendapatan, pendidikan, kesehatan dan akses masyarakat nelayan. Sedangkan untuk partisipasi, diperoleh 49 orang (90,7%) masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut dengan tidak ada paksaan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka pada intinya Program ini tidak berjalan lancar, tidak merata dan tidak ada dampak yang berarti bagi masyarakat nelayan karena pinjaman dana dari Program PEMP itu, hanya digunakan sebagai modal melaut bagi nelayan. Oleh karena itu maka peneliti akan menjawab bentuk model pengembangan program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan yang sesuai bagi masyarakat nelayan. Model yang diberikan harus benar-benar menyentuh langsung pada masyarakat. Dimana dengan adanya kerjasama/kesepakatan antar masyarakat nelayan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menggabungkan antara keinginan dan kebutuhan dari semua unsur yang terkait. Sehingga program ini tidak terpusat pada pinjaman dana saja. Tetapi diberikan bantuan seperti perahu, alat tangkap dan sebagainya yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dari kebutuhan dan keinginan yang telah disepakati bersama, maka *kedua*, pihak DKP berkoordinasi dengan LEPPM3. Dimana LEPPM3 sebagai komponen utama pelaksana Program PEMP di daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan, koperasi/LEPPM3 harus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab di daerah dan juga dengan lembaga perbankan sebagai mitra usaha. Selain itu juga dengan ditambahkan tenaga pendamping serta pengawasan yang dilakukan sehingga tidak ada unsur KKN yang terjadi. Karena pengembangan program akan lebih efektif bila melibatkan peran TPD (Perguruan Tinggi dan LSM). Sehingga untuk menunjang konsep model tersebut, peran Perguruan Tinggi dan LSM sebagai fasilitator pengembangan SDM harus dimasukkan dalam sistim.

Adapun saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini yaitu, Pengembangan Program akan lebih efektif bila melibatkan peran TPD (Perguruan Tinggi dan LSM). Sehingga untuk menunjang konsep model tersebut, peran Perguruan Tinggi dan LSM sebagai fasilitator pengembangan SDM harus dimasukkan dalam sistim. Program PEMP harus merata khususnya dengan mendahulukan masyarakat nelayan yang lebih membutuhkan. Selain itu, diberikan syarat dan ketentuan dalam peminjaman agar jika terjadi masalah dalam pengembalian dana, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT pemilik segala ilmu dan satu-satunya pemberi hidayah serta ilham, Shalawat dan salam senantiasa tercurah ke pangkuan hamba Allah SWT terkasih Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih atas terselesainya Laporan Skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP selaku dosen pembimbing I
2. Ibu Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP selaku dosen pembimbing II
3. Bapak dan Ibu Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo
4. Kedua orang tua tercinta serta saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga terselesainya Laporan ini.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga Laporan Skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis megharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini. Namun demikian, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berminat dan memerlukannya.

Malang, Juni 2009

Penulis



SKRIPSI

EVALUASI MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI
KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR

Oleh:

NUR ILMI AGRIFAJARPERTIWI

NIM. 0510840051

Mengetahui
Ketua Jurusan

(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)
NIP. 131 914 292

Menyetujui, Dosen,
Pembimbing I

(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)
NIP. 131 914 292

Dosen Pembimbing II

(Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP)
NIP. 131 879 039

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT pemilik segala ilmu dan satu-satunya pemberi hidayah serta ilham, Shalawat dan salam senantiasa tercurah ke pangkuan hamba Allah SWT terkasih Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih atas terselesainya Laporan Skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP selaku dosen pembimbing I
2. Ibu Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP selaku dosen pembimbing II
3. Bapak dan Ibu Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo
4. Kedua orang tua tercinta serta saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga terselesainya Laporan ini.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga Laporan Skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis megharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini. Namun demikian, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berminat dan memerlukannya.

Malang, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Tempat dan waktu	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kondisi Perikanan.....	6
2.2 Penelitian Evaluasi	8
2.2.1 Pengertian Evaluasi.....	8
2.2.2 Macam-macam Evaluasi.....	11
2.2.3 Tujuan Evaluasi	13
2.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	13
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan	13
2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	16
2.3.3 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.....	17
BAB III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Penentuan Lokasi Penelitian	20
3.2 Jenis Penelitian	21
3.3 Metode Pengambilan Sampel	22

3.3.1	Populasi Penelitian	23
3.3.2	Sampel Penelitian	23
3.4	Teknik Pengumpulan Data	26
3.5	Jenis dan Sumber Data	27
3.6	Konsep, Variabel dan Definisi Operasional	28
3.7	Skala Pengukuran	31
3.8	Analisa Data	32
3.9	Kerangka Penelitian	37
BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN		43
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Situbondo	43
4.1.1	Letak Geografis	43
4.1.2	Keadaan Topografi	44
4.2	Keadaan Penduduk	45
4.3	Potensi Perikanan	46
4.4	Keadaan Umum Dinas Kelautan dan Perikanan	47
4.4.1	Visi dan Misi	47
4.4.2	Struktur Organisasi	48
4.4.3	Tugas dan Wewenang	50
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN		53
5.1	Karakteristik Responden	53
5.2	Profil Program PEMP	55
5.2.1	Tujuan PEMP	57
5.2.2	Sasaran	57
5.2.3	Organisasi Pengelola Program	58
5.3	Evaluasi Pelaksanaan Program PEMP di Kabupaten Situbondo	61
5.3.1	Sasaran Program PEMP	63
5.3.2	Pendekatan Program	65
5.3.3	Prinsip Pengelolaan dan Pengembangan Program	66
5.3.4	Pendampingan	70
5.4	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	77
5.5	Model Pemberdayaan Yang Sesuai Bagi Masyarakat Nelayan	82

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN..... 88
6.1 Kesimpulan..... 88
6.2 Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN 92

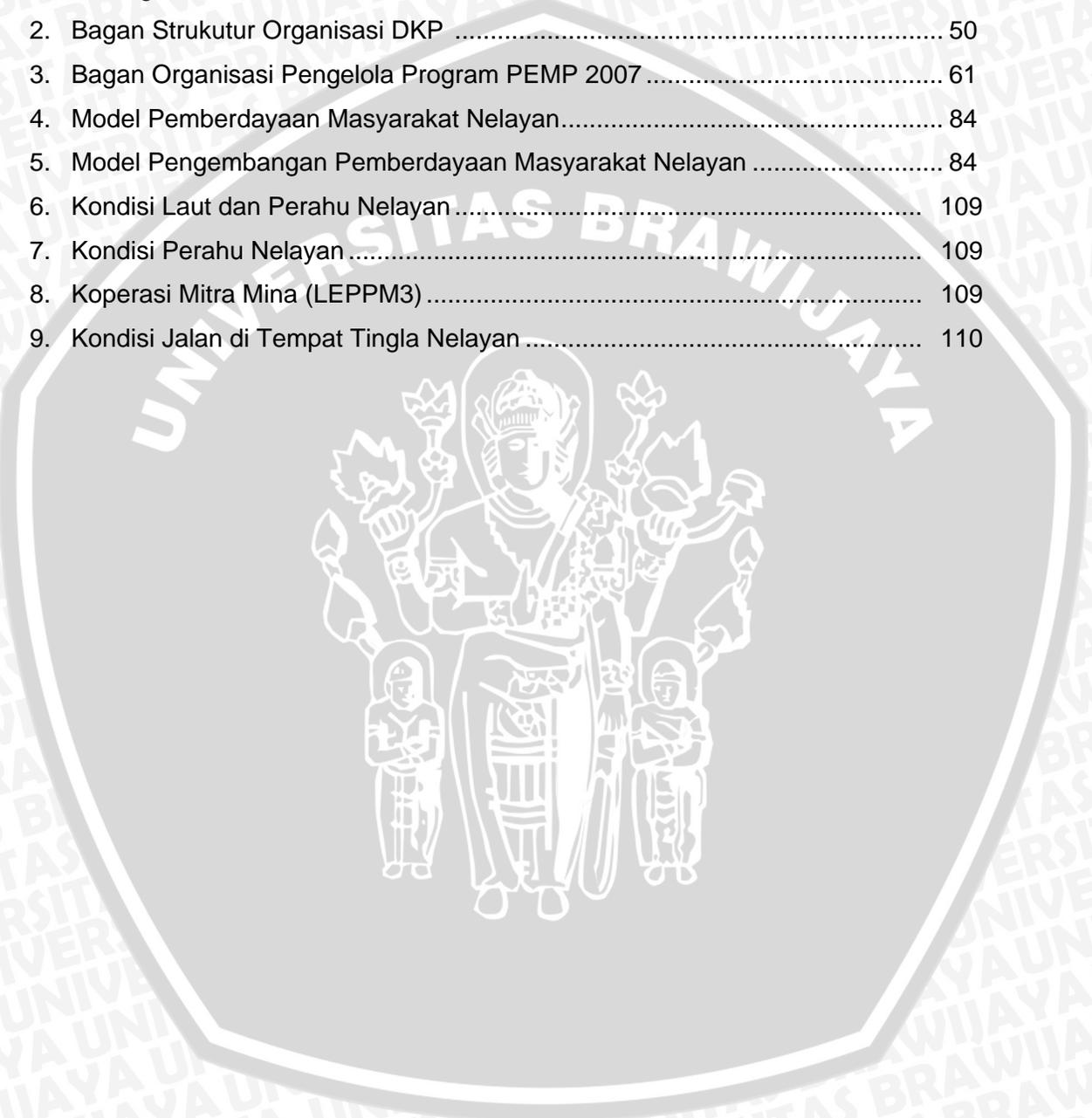


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sampel per Desa	25
2. Penilaian/pemberian Skor Jawaban Responden	32
3. Data Masing-masing Variabel Terhadap Evaluasi Program.....	33
4. Data Masing-masing Variabel Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	35
5. Data Kuesioner Terhadap Responde	36
6. Definisi, Indikator dan Item Indikator dari Variabel	39
7. Jumla Penduduk per Kecamatan, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Siubondo	45
8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Situbondo tahun 2007	46
9. Karakteristik Responden	53
10. Data Kondisi Masyarakat Pesisir	55
11. Penilaian Pendekatan Program PEMP	66
12. Penilaian Prinsip Pengelolaan dan Pengembangan PEMP	69
13. Data Analisis Penilaian Masing-masing Variabel Terhadap PEMP	71
14. Data Analisis Penilaian Variabel Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	75
15. Respon Masyarakat tentang Program PEMP	78
16. Motivasi Masyarakat dengan Adanya PEMP	79
17. Kesejahteraan Masyarakat	81
18. Partisipasi Masyarakat	82

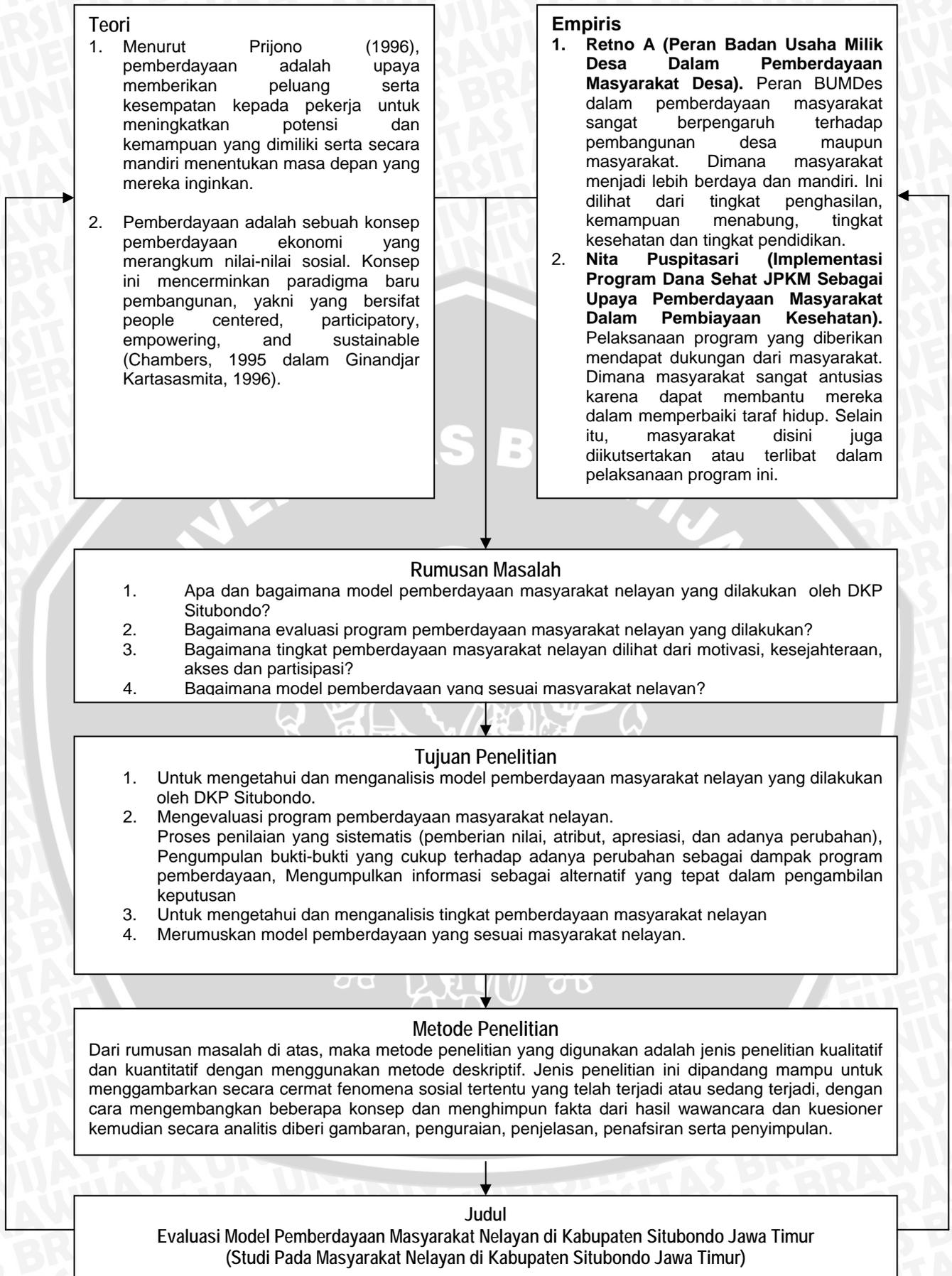
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Penelitian	38
2. Bagan Struktur Organisasi DKP	50
3. Bagan Organisasi Pengelola Program PEMP 2007	61
4. Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.....	84
5. Model Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	84
6. Kondisi Laut dan Perahu Nelayan.....	109
7. Kondisi Perahu Nelayan	109
8. Koperasi Mitra Mina (LEPPM3)	109
9. Kondisi Jalan di Tempat Tingla Nelayan	110



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Situbondo	92
2. Peta Kecamatan Panarukan	93
3. Peta Kecamatan Mangaran.....	94
4. Tabel Produksi dan Penerimaan Melaut Nelayan Juragan sebelum Mendapat program PEMP	95
5. Tabel Biaya Operasional Melaut Nelayan Juragan sebelum,Mendapat program PEMP	96
6. Tabel Biaya Operasional Melaut Nelayan Pandega sebelum Mendapat program PEMP	97
7. Tabel Pendapatan Melaut Nelayan Juragan sebelum Mendapat program PEMP	99
8. Tabel Pendapatan Melaut Nelayan Pandega sebelum Mendapat program PEMP	100
9. Tabel Produksi dan Penerimaan Melaut Nelayan Juragan setelah Mendapat program PEMP	102
10. Tabel Biaya Operasional Melaut Nelayan Juragan setelah Mendapat program PEMP	103
11. Tabel Biaya Operasional Melaut Nelayan Pandega setelah Mendapat program PEMP	104
12. Tabel Pendapatan Melaut Nelayan Juragan setelah Mendapat program PEMP	106
13. Tabel Pendapatan Melaut Nelayan Pandega setelah Mendapat program PEMP	107



Gambar 1.
Kerangka Penelitian

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan sekaligus peluang memasuki millenium ke-3 yang dicirikan oleh proses transformasi global yang bertumpu pada perdagangan bebas dan kemajuan IPTEK. Sementara itu, di sisi lain tantangan yang paling fundamental adalah bagaimana untuk keluar dari krisis ekonomi yang menghantam bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan mempersiapkan perekonomian nasional dalam percaturan global abad 21. Dalam rangka, menjawab tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, diperlukan peningkatan efisiensi ekonomi, pengembangan teknologi, produktivitas tenaga kerja dalam peningkatan kontribusi yang signifikan dari setiap sektor pembangunan (Kusumastanto T, 2008). Hal ini terjadi pula pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki, sudah selayaknya pembangunan pada sektor tersebut dikembangkan agar dapat mendukung pembangunan secara nasional khususnya dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. Berdasarkan pada potensi sumberdaya yang ada, maka pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Situbondo mengusahakan potensi kelautan dan perikanan menjadi berbagai kegiatan ekonomi yang perlu dipacu melalui peningkatan investasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu memberikan sumbangan yang lebih besar pada upaya Pembangunan Nasional dan Pembangunan Situbondo.

Dalam rangka menciptakan Pembangunan Situbondo ini, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan. Dimana pemberdayaan ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah melibatkan peran masyarakat serta swasta pada proses penyusunan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat nelayan

Menyadari realitas yang ada pada nelayan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan sangat dibutuhkan. Dasar proses pemberdayaan adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Lebih lanjut, harapan dari proses pemberdayaan ini adalah terwujudnya masyarakat yang bermartabat. Dan dalam proses pembangunan ini harus dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, dengan memegang teguh aturan-aturan mengenai apa yang menjadi hak dan mana yang bukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk menumbuhkan kembangkan perilaku yang berbudaya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja model pemberdayaan yang dilakukan dan apakah pemberdayaan masyarakat nelayan yang dijalankan oleh Pemerintah Situbondo khususnya dinas terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut telah berjalan secara optimal? Serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari program itu. Dengan

asumsi tersebut, maka peneliti mengambil judul **"Evaluasi Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Situbondo"** (Studi Pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Situbondo Jawa Timur).

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri. Seperti permasalahan yang ada yaitu masalah masih terikatnya nelayan dengan juragan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan dan masih rendahnya pola pikir masyarakat. Untuk itu, maka rumusan masalah yang dapat kami susun adalah sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana model pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Situbondo?
2. Bagaimana evaluasi program pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan?
3. Bagaimana tingkat pemberdayaan masyarakat nelayan dilihat dari motivasi, kesejahteraan dan partisipasi?
4. Bagaimana model pemberdayaan yang sesuai masyarakat nelayan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Model pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
2. Mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat nelayan.
 - Proses penilaian yang sistematis (pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan adanya perubahan)

- Pengumpulan bukti-bukti yang cukup terhadap adanya perubahan sebagai dampak program pemberdayaan
 - Mengumpulkan informasi sebagai alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan
3. Tingkat pemberdayaan masyarakat nelayan (motivasi, kesejahteraan dan partisipasi).
 4. Merumuskan model pemberdayaan yang sesuai masyarakat nelayan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah peneliti uraikan, maka kegunaan penelitian diharapkan berguna bagi:

1. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bahwa model pemberdayaan tersebut dapat dijadikan panduan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

2. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif model pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten maupun Desa

3. Peneliti

Sebagai wahana bagi peneliti dalam memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menambah wawasan dalam berpikir praktis.

Serta dapat dijadikan sebagai bahan pembanding bagi peneliti-peneliti terdahulu dan sebagai referensi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul dan topik yang sejenis.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Maret 2009.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi perikanan

Sektor Kelautan mulai diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan sejak pelita VI rejim orde baru. Sejak kemerdekaan sampai awal pelita VI tersebut, pemerintah lebih memperhatikan eksploitasi sumberdaya daratan, karena pada masa tersebut daratan masih mempunyai potensi yang sangat besar baik sumberdaya mineral maupun sumberdaya hayati seperti hutan. Namun setelah hutan ditebang habis sedangkan sumberdaya minyak dan gas bumi sulit ditemukan didaratn pemerintah orde baru mulai berpaling kepada sektor kelautan (Budiharsono S., 2001) dalam Abubakar (2001).

Potensi Kelautan Indonesia sangat besar dan beragam yakni memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan 5,8 juta km² laut atau 70 persen dari luas total Indonesia. Potensi tersebut tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati, selain potensi budidaya perikanan pantai di laut serta pariwisata bahari (Abubakar, 2001).

Potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia sebesar 6.167.940 ton/tahun dengan porsi terbesar dari jenis ikan pelagis kecil (52,54 %), jenis ikan demersal (28,96 %) dan perikanan pelagis besar (15,81 %) komoditi. Selain potensi tersebut masih tersimpan potensi perikanan yang bernilai ekonomi tinggi seperti kepiting, rumput laut dan rajungan (Budiharsono S., 2001) dalam Abubakar (2001). Potensi yang besar tersebut akan menjadi suatu kenyataan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia jika ekosistem pesisir dan laut tidak dirusak karena perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Sektor perikanan memang unik, beberapa karakteristik yang melekat di dalamnya tidak dimiliki oleh sector-sector lain seperti pertanian ataupun pertambangan. Tidaklah mengherankan jika kemudian penanganan masalah di sector ini memerlukan pendekatan tersendiri. Selain berhadapan dengan *fugitive resource* (sumberdaya yang bergerak terus) dan kompleksitas biologi dan fisik perairan, pengelolaan sumberdaya perikanan juga dihadapkan pada masalah peliknya hak kepemilikan (*common property resource*). Interaksi factor ini kemudian melahirkan eksternalitas yang berakibat pada terjadinya penangkapan ikan yang berlebih (*excessive*) yang kemudian menyebabkan menurunnya stok sumberdaya (Fauzi A, 2005).

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan penduduk dunia menyebabkan pengelolaan sumberdaya ikanpun semakin kompleks. Apalagi jika dilihat dari konteks Negara berkembang seperti Indonesia di mana factor social, politik, ekonomi, dan demografi yang tidak mendukung menyebabkan pengelolaan perikanan menjadi *the big challenging exercise* bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Tidaklah mengherankan apabila kemudian selama enam puluh tahun bangsa ini merdeka, sector perikanan belum menunjukkan giginya sebagai sector yang dapat diunggulkan, meski realitas potensi fisik dan geografis sumberdaya ikan jauh lebih baik daripada negara-negara di Asia lainnya (Fauzi A, 2005).

Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan pembangunan di bidang ekonomi untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pada potensi sumberdaya alam yang ada, maka pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Situbondo mengusahakan potensi kelautan dan perikanan menjadi berbagai kegiatan ekonomi yang perlu dipacu melalui peningkatan investasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan

kelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu memberikan sumbangan yang lebih besar pada upaya Pembangunan Nasional dan Pembangunan Situbondo.

Dalam rangka menciptakan Pembangunan Nasional hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebuah proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun.

2.2 Penelitian Evaluasi

Penelitian evaluasi (atau lebih sederhana, evaluasi) ialah istilah umum untuk menyebut berbagai macam kegiatan penelitian. Penelitian evaluasi umumnya dianggap untuk diterapkan, tidak seperti halnya penelitian dasar. Orientasi penelitian terapan ialah untuk menemukan pemecahan masalah-masalah social yang spesifik, sedangkan penelitian dasar secara khas di arahkan untuk memajukan ilmu pengetahuan itu sendiri (Rossi, Wright, dan Wright, 1978:173) dalam Sulistia et al (1991:319).

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi atau penilaian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Tuckman (1975:12) mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi berkaitan erat dengan pengertian pengukuran. Selain itu, evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis

mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan (Tim Penyusun Pedoman Mutu Kerja Inspektorat BPKP).

Istilah evaluasi atau penilaian adalah sebagai terjemahan dari istilah asing "evaluation". Menurut Benyamin S. Bloom dikemukakan bahwa: "Evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk kemudian dijadikan dasar penetapan ada tidaknya perubahan dan derajat perubahan yang terjadi pada diri seseorang". Oleh karena itu dalam kegiatan evaluasi kita harus melakukan setidaknya-tidaknya dua hal yaitu:

1. mengumpulkan bukti-bukti yang cukup
2. menetapkan ada tidaknya perubahan dan derajat perubahan yang terjadi pada diri seseorang.

Bukti-bukti yang dikumpulkan dapat bersifat kuantitatif (dalam bentuk angka-angka) dan dapat pula bersifat kualitatif, yaitu menunjukkan kualifikasi seperti: baik sekali, baik, sedang atau cukup, atau tidak baik. Bukti-bukti kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ada tidaknya perubahan perilaku serta derajat perubahan yang ada secara adil dan obyektif.

Mengambil pendapat Aji B. Firman (1982:30) bahwa evaluasi juga adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen, khususnya manajemen proyek. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Dimana hasil-hasil evaluasi dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan kembali. Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen berurusan dan berusaha untuk mempertanyakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur secara obyektif mungkin hasil-hasil itu dengan ukuran-

ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung sesuatu rencana.

Keberhasilan rencana kegiatan, rencana program dan rencana proyek hanya dapat dibuktikan dengan evaluasi. Dengan demikian evaluasi haruslah dikembangkan secara melembaga dan membudayakan agar pelaksanaan kegiatan, program dan proyek pembangunan dapat lebih berhasil, bermanfaat dan berdayaguna (Aji B. Firman, 1982:30).

Sedangkan menurut Suharsimin Arikunto (2004:1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan (Sudharsono 1994:2).

Menurut Stufflebeam dalam Worthen dan Sanders (1979 : 129) dalam Lababa D (2008) evaluasi adalah : *process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives*. Dalam evaluasi ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu : adanya sebuah proses (*process*) perolehan (*obtaining*), penggambaran (*delineating*), penyediaan (*providing*) informasi yang berguna (*useful information*) dan alternatif keputusan (*decision alternatives*). Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa orang di atas, kita dapat menarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Dalam evaluasi terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian meskipun secara prinsip, antara kedua kegiatan ini memiliki metode yang sama. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan pelaksanaannya. Jika penelitian bertujuan untuk membuktikan sesuatu (*prove*) maka evaluasi bertujuan untuk mengembangkan (*improve*). Terkadang, penelitian dan evaluasi juga digabung menjadi satu frase, penelitian evaluasi. Sebagaimana disampaikan oleh Sudharsono (1994 : 3) penelitian evaluasi mengandung makna pengumpulan informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan obyektif (Lababa D, 2008).

2.2.2 Macam-Macam Evaluasi

Rossi, Freeman, dan Wright (1979:32-51) dalam Sulistia et al (1991:320) mengidentifikasi adanya empat macam evaluasi: perencanaan program, pemantauan program, penilaian dampak dan efisiensi sumber atau biasa disebut efisiensi “ekonomi”.

1. Perencanaan Program

Dalam perencanaan ini, berkaitan dengan bagaimana merencanakan suatu program. Dimana ini terkait dengan apakah program tersebut diperlukan, berapa banyak jumlah responden yang termasuk dalam populasi sasaran, cara apa yang paling baik untuk mencapai tujuan, dan informasi apa saja yang perlu disampaikan oleh program kepada responden.

2. Pemantauan Program

Pemantauan program memastikan bahwa populasi sasaran benar-benar mendapat pelayanan, informasinya tepat, stafnya ada, dan seterusnya. Implementasi program dan pemantauan diarahkan pada proses sejauh

mana kegiatan yang direncanakan tersebut sudah dilaksanakan. Sedangkan menurut Stephen Isaac dan Willian B. Michael (1984:7) dalam Lababa D (2008), pantauan ini dilakukan secara terus menerus terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga harus dapat memberikan informasi-informasi yang akurat dan obyektif bagi pengambilan kebijakan untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan program. Dimana informasi ini berhubungan dengan memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan. Selain itu informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan program.

3. Penilaian Pengaruh

Penilaian pengaruh melihat pada hasil sistem. Misalnya yang berkaitan dengan program. Peranyaan-pertanyaan bisa meliputi apakah informasi diberikan dengan cara yang mudah dimengerti, apakah perubahan yang terjadi jelas-jelas disebabkan oleh program. Dalam Lababa D (2008), penilaian ini menilai kemajuan-kemajuan yang dicapai peserta program serta efektifitas temuan-temuan yang dicapai oleh sebuah program.

4. Efisiensi Sumber

Masalah efisiensi sumber berkaitan dengan kemungkinan mendapatkan cara yang sama efektifnya tetapi dengan biaya yang sedikit murah untuk mencapai tujuan-tujuan program.

Tetapi dalam praktek, evaluasi yang paling umum ialah pemantauan program dan penilaian pengaruh. Begitu pula dalam penelitian ini. Alasan utama yang menekankan pada kedua macam evaluasi ini ialah bahwa (1) kebanyakan program sudah berjalan ketika evaluasi dimulai dan karenanya tidak ada kesempatan untuk mengevaluasi perencanaan program, dan (2) para pengelola cenderung lebih memperhatikan pengaruh nyata suatu program yang dapat

didemonstrasikan daripada persoalan apakah pengaruhnya bisa diperoleh dengan masukan sumber yang rendah.

2.2.3 Tujuan Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu. Demikian juga dengan evaluasi. Menurut Sulistia (1991:321), evaluasi program dilaksanakan di lingkungan organisasi untuk keperluan lembaga. Kalau peneliti dapat menambahkan pertanyaan-pertanyaan teoritis atau pertanyaan penelitian dasar, ada baiknya, tetapi tujuan utama dari evaluasi ialah untuk mengumpulkan informasi tentang prosedur atau program yang barangkali bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh pengelola program.

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2004:13) dalam lababa D(2008) ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (*decision maker*) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Posisi sebagai mitra yang berimbang hanya dapat terwujud dengan melalui proses pembenahan di segala segi, termasuk konsekuensi untuk

memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pemberdayaan yang tepat kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjadi pendukung atas penyelenggaraan pembangunan.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996 : 144), dalam Partosuwiryo (2003) memberdayakan mengandung pengertian “Upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu, hanya dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat”.

Sedangkan menurut Sulistiyani (2004), secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kemampuan, dan atau proses pemberian daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “mamperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan,

menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali, dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian (Sulistiyani A, 2004).

Sedangkan menurut Vitayala (2000) dalam Sandra (2008), Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) adalah perwujudan *capacity building* masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, serta pengembangan Tiga-P; Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, Penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat dan Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat. (Sandra, 2008).

Menurut kaidah ekonomi, pemberdayaan masyarakat adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapatkan surplus value sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi (melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dengan kondisi dan tingkatan sosial budaya).

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumberdaya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik-material. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, efektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan (Sulistiyani A, 2004).

Pada awalnya upaya memberdayakan masyarakat pasti dihadapkan pada suatu kondisi masyarakat atau bagian dari masyarakat yang masih dalam posisi dan kondisi yang lemah. Mungkin terjadi masyarakat secara keseluruhan yang berada pada wilayah tertentu sama sekali belum berdaya. Dengan demikian orientasi pemberdayaan memang secara tegas menunjuk suatu *target group*

masyarakat itu sendiri. Di sisi lain sangat mungkin terjadi bahwa sasaran yang perlu diberdayakan hanyalah merupakan bagian dari suatu masyarakat saja, yaitu khususnya pihak yang belum memiliki daya (Sulistiyani A, 2004).

2.3.3 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat (Syarif E, 2001).

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:

- a. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

- c. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d. Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

- (a) **Kelembagaan.** Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (*intermediate*) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.
- (b) **Pendampingan.** Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.
- (c) **Dana Usaha Produktif Bergulir.** Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping (Syarief E, 2001).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Didalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, untuk itu diperlukan data dan informasi yang relevan. Untuk memecahkan masalah dengan baik, maka perlu terlebih dahulu menentukan langkah-langkah dalam metode penelitian yang dipergunakan. Pada dasarnya metode diartikan sebagai suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan pedoman atau cara yang dilakukan suatu penelitian agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam suatu penelitian, lokasi penelitian sangatlah penting untuk ditentukan. Lokasi penelitian dilakukan di 3 (tiga) Desa di Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Situbondo merupakan lokasi yang sebagian besar (1.142,4 Km²) wilayahnya lautan dengan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti memilih Kabupaten Situbondo sebagai lokasi penelitian. Selain itu, 3 (tiga) Desa tersebut menjadi pusat pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan dua alasan penting. Pertama, bahwa jenis penelitian ini dipandang mampu untuk menggambarkan secara cermat fenomena sosial tertentu yang telah terjadi atau sedang terjadi, dengan cara mengembangkan beberapa konsep dan menghimpun fakta, kemudian secara analitis diberi gambaran, penguraian, penjelasan, penafsiran serta penyimpulan. Fenomena yang akan dideskripsikan dan dianalisis melalui penelitian ini mengacu pada fenomena “apa yang terjadi” (deskriptif), dan “bagaimana terjadinya” (analitis) model pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Situbondo serta mengungkap dan memahami apa saja yang terjadi dibalik fenomena yang sedikit belum diketahui di lapangan serta penelitian kualitatif dapat mengungkap nilai-nilai tersembunyi dari penelitian ini. Sedangkan alasan yang kedua adalah bahwa dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti berupaya untuk menjelaskan bagaimana tingkat pemberdayaan masyarakat nelayan dilihat dari motivasi, kesejahteraan dan partisipasinya berdasarkan scoring hasil kuesioner yang diperoleh.

Meminjam pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam (Moleong, 2005) bahwa penelitian kualitatif dikatakan olehnya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini, lebih mengandalkan unsur manusia (peneliti) sebagai instrument utama, dan berinteraksi dengan orang yang diamati dalam suatu cakupan yaitu pada kantor Desa/Kecamatan, DKP Situbondo serta tempat-tempat yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini guna menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata atau lisan yang diperoleh dengan melakukan

wawancara, serta kegiatan lainnya yang dapat menunjang seperti observasi dan dokumentasi.

Sedangkan menurut Sedarmayanti dan Hidayat S (2002:35), penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian/metode yang didasari oleh ilmu yang valid, ilmu yang dibangun dari empiris, teramati, terukur, menggunakan logika matematika dan membuat generalisasi atas terata. Dalam Kuncoro (2001) bahwa metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah dimana pendekatan ini berangkat dari data. Ibarat bahan baku dalam suatu pabrik, data ini diproses dan dimanipulasi menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Menurut Teken (1965: 38) dalam Singarimbun Dan Effendi (1995) bahwa Dalam suatu penelitian tidak selalu perlu meneliti seluruh individu dalam suatu populasi, karena membutuhkan waktu yang lama selain itu juga memakan biaya yang cukup besar. Dengan meneliti sebagian dari populasi kita mengharapkan bahwa hasil yang diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi bersangkutan. Untuk mencapai tujuan ini, maka cara-cara pengambilan sebuah sampel harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dimana sebuah sampel haruslah dipilih sedemikian rupa sehingga setiap satuan elementer mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih dan besarnya peluang tersebut tidak boleh sama dengan 0.

Suatu metode pengambilan sampel juga memiliki sifat-sifat seperti:

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti.
2. Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh.
3. Sederhana, hingga mudah dilaksanakan.

4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya (Teken, 1965: 38).
5. Dengan penelitian sampel, maka akan lebih efisien (dalam arti uang, waktu, dan tenaga) (Arikunto, 2002).

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu masyarakat nelayan di 3 (tiga) desa pada 2 Kecamatan di Kabupaten Situbondo Jawa Timur yaitu sebanyak 526 rumah tangga nelayan.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling (Usman dan Akbar, 2006).

Menurut Arikunto (2006:131), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Arikunto, 2006:133).

Dalam penelitian ini cara pengambilan sampel diambil dengan menggunakan *Sampel bertujuan* atau *Purposive sample* dalam 2 (dua) tahap. Dimana *tahap pertama*, sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga

tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Pengambilan sampel dengan teknik bertujuan ini cukup baik karena sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi (Arikunto, 2002: 117). Disini peneliti memilih beberapa desa untuk menentukan daerah yang tepat dijadikan sebagai sampel. Desa yang dipilih yaitu Desa Gelung di Kecamatan Panarukan dan Desa Semiring serta Tanjung Pecinan di Kecamatan Mangaran yang dapat mewakili populasi. Pemilihan sampel ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa padatnya masyarakat nelayan. Selain itu, 3 (tiga) Desa tersebut menjadi pusat pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Menurut Arikunto (2006:134) cara menentukan sampel yaitu apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.
- c. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang risikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar, hasilnya akan lebih baik.

Dari keterangan diatas maka dalam penelitian ini diambil 10% untuk masing-masing desa dari jumlah populasi. Adapun jumlah sampel masing-masing nelayan pada setiap kecamatan/desa diperoleh dengan menghitung jumlah sampel total yang telah ditentukan dibagi jumlah populasi total kemudian dikalikan dengan jumlah populasi bagian.

Untuk memperoleh perimbangan jumlah sampel dari masing-masing bagian ditentukan dengan rumus :

$$JSB = \frac{JST}{JPT} \times JPB$$

Keterangan :

JSB : jumlah sampel bagian

JST : jumlah sampel total

JPB : jumlah populasi bagian

JPT : jumlah populasi total (Winarsunu, 2007:13)

Berdasarkan data jumlah nelayan pada 3 desa yang telah terpilih, maka jumlah populasi total (JPT) sebesar 526 nelayan. Mengambil pendapat Arikunto, bahwa jika jumlah populasi besar maka sampel yang diambil disini sebesar 10% dari populasi total (JPT). Untuk mengetahui jumlah sampel total maka sampel didapat,

$$\begin{aligned} JST &= 10\% \times 526 \\ &= 52,6 = 53 \end{aligned}$$

Perhitungan sampel pada setiap desa dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Sampel per Desa

No.	Kecamatan	Desa	Populasi	Perhitungan	Sampel
1.	Panarukan	Gelung	54	$\frac{53}{526} \times 54$	5,44 = 6
2.	Mangaran	Semiring	146	$\frac{53}{526} \times 146$	14,7 = 15
3.	Mangaran	Tj. Pecinan	326	$\frac{53}{526} \times 326$	32,8 = 33
	Jumlah		526		54

Sedangkan untuk *tahap kedua*, sampel bertujuan atau Purposive sample digunakan untuk memilih responden dari sampel masing-masing desa pada tabel di atas. Dimana dari banyaknya sampel yang ditentukan tersebut dipilih responden yang terlibat langsung dengan program PEMP (responden yang menjadi daftar/penerima program). Selain itu, pemilihan ini juga diperoleh dari responden/masyarakat yang lebih sering menerima pinjaman dana dari Program PEMP atau yang memperoleh dana pinjaman sebanyak 3x.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data (Arikunto, 2002, h.126) Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Wawancara (interview) atau kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2002, h. 132). Wawancara ini dilaksanakan oleh peneliti dengan melibatkan beberapa aparat Pemerintah Desa/Kecamatan dan masyarakat nelayan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang sudah tersedia pada lokasi dan situs penelitian. Bahan-bahan ini dapat

berupa arsip-arsip serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan tersebut.

c. Kuesioner

Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (arikunto, 2006:151).

3.5 Jenis dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2002, h. 107) yang dimaksud dengan sumber data adalah merupakan subyek bagi peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan dan relevan dengan tema penelitian. Berkaitan dengan hal ini maka jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan atau juga data yang didapatkan dari laporan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

a. Hasil wawancara dengan:

1. Kepala dan staf DKP
2. Perangkat desa/Kecamatan
3. Masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data primer. Data ini biasanya dari dokumen, arsip, perpustakaan dan laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder

ini, disebut juga sebagai data yang telah tersedia. Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah:

- a. Keadaan Umum Lokasi Penelitian
- b. Profil PEMP Kabupaten Situbondo
- c. Pedoman Umum Pelaksanaan PEMP

3.6 Konsep, Variabel dan Definisi Operasional

Menurut Singarimbun Dan Effendi (1995), konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Agar konsep tersebut dapat diteliti, maka harus dapat dioperasionalkan dengan cara menjabarkan menjadi variable-variabel tertentu sehingga memudahkan dalam proses pengukuran dan pencarian datanya.

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Nazir, 2005:12). Sedangkan menurut Arikunto (1998:99), variabel adalah obyek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Untuk memudahkan dalam penelitian maka perlu ditetapkan dulu variabel apa saja yang akan dijadikan obyek penelitian. Variabel ini harus didefinisikan agar mudah dalam pengolahan datanya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai dan ditetapkan untuk diteliti sehingga diperoleh informasi kemudian ditarik kesimpulan.

Variabel-variabel dalam penelitian antara lain:

1. Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah motivasi untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing individu sehingga terwujud partisipasi yang kuat dalam diri masyarakat.

Menurut Marzuki (2005), definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang dapat diamati. Dari definisi operasional tersebut dapat ditentukan alat pengambil data yang cocok dipergunakan.

1. Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Variabel evaluasi ini, akan diukur berdasarkan indikator berikut ini, yaitu:

a. Pemberian nilai

- Perencanaan program
- Proses jalannya program
- Pelaksanaan
- Hasil pelaksanaan
- Waktu yang ditentukan

b. Pemberian atribut

c. Pemberian apresiasi

d. Perubahan

- Masyarakat/SDM
 - Lingkungan
 - Hubungan antar masyarakat dan antar pemerintah
 - Ketercapaian program
- e. Pengumpulan bukti-bukti ada tidaknya perubahan
- Bukti-bukti ketercapaian (dilihat dari pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat)
 - Bukti-bukti kesesuaian tujuan dengan hasil program
 - Perubahan lingkungan yang mulai membaik
- f. Pengumpulan informasi
- Memberikan gambaran terhadap lingkungan
 - Memberikan gambaran terhadap kebutuhan
 - Penggunaan sumberdaya yang tersedia
 - Sejauh mana kegiatan yang direncanakan sudah dilaksanakan
- g. Pengambilan keputusan
- Perumusan kebijakan
2. Pemberdayaan
- a. Motivasi
- Semangat kerja
 - Semangat berorganisasi
- b. Peningkatan taraf hidup
- Pendapatan
 - Pendidikan
 - kesehatan
- c. Partisipasi
- Ikut serta dalam suatu kegiatan apabila dimintai bantuan

- Ikut serta dalam suatu kegiatan tanpa imbalan/dimintai bantuan
- Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 6.

3.7 Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2008), skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kualitatif. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah *skala semantic*, *skala semantic* akan menghasilkan respon terhadap sebuah stimulasi yang disajikan dalam bentuk kategori *semantic* yang menyatakan sebuah tingkatan sifat atau keterangan tertentu. Skala ini dikembangkan oleh Osgood, Suci dan Tannenbaum yang bertujuan untuk mengukur pengertian suatu obyek atau konsep oleh seseorang (Nazir, 2005). Skala ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana pandangan seseorang terhadap suatu konsep/obyek, apakah sama atau berbeda (Sedarmayanti dan Hidayat S, 2002). Skala ini digunakan untuk mengukur sikap/karakter tertentu yang dimiliki seseorang. Pada penelitian ini variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban dari setiap instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative dengan skor 0-4, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Penilaian /pemberian skor jawaban responden

Jawaban	Nilai
Sangat setuju	4
Setuju	3
Kurang setuju	2
Tidak setuju	1
Tidak tahu	0

3.8 Analisa Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian. Hal ini dikarenakan analisa data menyangkut kekuatan analisa dan kemampuan dalam mendeskripsikan data, situasi, peristiwa dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Dengan analisa, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Analisa data merupakan tahapan yang harus dilakukan dengan penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam kegiatan ini adalah data yang telah terkumpul akan diolah sehingga memberikan informasi. Pada penelitian deskriptif seperti jenis penelitian ini, akan dipergunakan teknik analisis kuantitatif yang didukung oleh data hasil kuesioner dan juga analisis kualitatif. Menurut Arikunto S (1998: 245) menyatakan "Analisa data dalam penelitian deskriptif yaitu apabila datanya telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka, hasil pengukurannya dapat diproses dengan beberapa cara yaitu:

- a. Dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh prosentase.
- b. Dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga merupakan susunan urut data untuk selanjutnya dibuat tabel, baik yang hanya berhenti sampai tabel saja, maupun yang diproses lebih lanjut menjadi perhitungan pengambilan kesimpulan ataupun untuk kepentingan visualisasi datanya”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka tahap-tahap analisis yang dilakukan sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka untuk menjawab tujuan pertama, yaitu untuk mengetahui dan menganalisa model pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh DKP didapat dari hasil wawancara yang dilakukan. Dimana dari hasil tersebut kemudian dideskripsikan (analisis deskriptif kualitatif). Data pertanyaan dapat dilihat di daftar pertanyaan.

Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu untuk menjawab tentang evaluasi program pemberdayaan didapat dari hasil wawancara kepada pihak DKP (pembuat program) yang mencakup proses penilaian yang sistematis, pengumpulan bukti-bukti terhadap adanya perubahan dan pengumpulan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat, didapat dari hasil wawancara terhadap masing-masing variabel yang mana dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data masing-masing variabel terhadap evaluasi program

No.	Variabel	Indikator	Keterangan
1.	Pemberian Nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Program • Proses jalannya program • Pelaksanaan • Hasil pelaksanaan • Waktu pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai/tidak dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya • Sesuai/tidak dengan perencanaan program • Bagaimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana (sejauh mana program masih tetap berjalan) • Apakah dampak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

			<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai/tidak dengan waktu yang telah ditargetkan/ditentukan
2.	Pemberian Atribut	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil yang dicapai 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan respon masyarakat/instansi lain yang terkait
3.	Pemberian Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil yang dicapai 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan respon masyarakat/instansi lain yang terkait
4.	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat/SDM • Lingkungan • Hubungan antar masyarakat dan antar pemerintah • Ketercapaian program 	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai/tidak perubahan yang terjadi pada SDM dengan tujuan/harapan yang diinginkan • Sesuai/tidak dengan tujuan/harapan yang diinginkan mengenai lingkungan • Sesuai/tidak dengan harapan yang diinginkan • Sesuai/tidak dengan tujuan yang ingin dicapai
5.	Pengumpulan bukti-bukti ada tidaknya perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti-bukti tercapainya program • Bukti-bukti kesesuaian program 	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai/tidak dengan realita yang ada di lapang • Sesuai/tidak dengan tujuan yang direncanakan
6.	Pengumpulan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan • Perencanaan program, proses jalannya, pelaksanaannya, hasil dan waktu yang di harapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai/tidak dengan realita dan perubahan yang terjadi • Seseuai/tidak dengan harapan/tujuan yang diinginkan
7.	Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan (adanya penyuluhan, pembangunan dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kebijakan sesuai dengan data yang telah terkumpul

Tabel 4. Data masing-masing variabel terhadap kesejahteraan masyarakat (Pendapatan, pendidikan, kesehatan dan akses)

No.	Variabel	Sebelum ada pemberdayaan	Setelah ada pemberdayaan
1.	Pendapatan		
2.	Pendidikan		
3.	Kesehatan		
4.	Akses		

Dari data yang telah ditetapkan akan dapat diperoleh jawaban dari tujuan kedua mengenai evaluasi program pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Situbondo.

Sedangkan untuk menjawab tujuan ketiga, mengenai tingkat pemberdayaan yang dilakukan, didapat dari hasil wawancara dan kuesioner terhadap responden/masyarakat nelayan dengan skor yang ditetapkan pada tabel 5.

Tabel 5. Data Kuesioner terhadap responden/masyarakat nelayan

No	Pertanyaan	Jawaban				
		Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	Tidak tau
<i>Program PEMP</i>						
1.	Pertanyaan 1	4	3	2	1	0
2.	Pertanyaan 2	4	3	2	1	0
3.	Pertanyaan 3	4	3	2	1	0
<i>Motivasi</i>						
4.	Pertanyaan 4	4	3	2	1	0
5.	Pertanyaan 5	4	3	2	1	0
6.	Pertanyaan 6	4	3	2	1	0
<i>Kesejahteraan Masyarakat</i>						
7.	Pertanyaan 7	4	3	2	1	0
8.	Pertanyaan 8	4	3	2	1	0
<i>Partisipasi</i>						
9.	Pertanyaan 9	4	3	2	1	0
10.	Pertanyaan 10	4	3	2	1	0
11.	Pertanyaan 11	4	3	2	1	0

Dari skor yang telah ditetapkan akan diperoleh jawaban dari responden sehingga didapat total skor dari penjumlahan nilai antar butir pertanyaan. Tingkat pemberdayaan ini dinilai dari motivasi, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat terhadap program tersebut. Nilai tertinggi merupakan kesimpulan atau jawaban mengenai tingkat ketercapaian suatu program. Misalnya, program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh DKP dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan sehingga terwujudnya kesejahteraan nelayan.

Selanjutnya untuk menjawab tujuan keempat, yaitu merumuskan model pemberdayaan yang sesuai masyarakat nelayan didapat dari data-data yang telah terkumpul dari tujuan pertama sampai pada tujuan ketiga. Dimana data-data tersebut didapat dari data sekunder(dokumen-dokumen) dan data primer (wawancara, observasi dan kuesioner) yang diperoleh. Dari data tersebut maka dapat merumuskan model pemberdayaan yang sesuai bagi masyarakat nelayan nantinya.

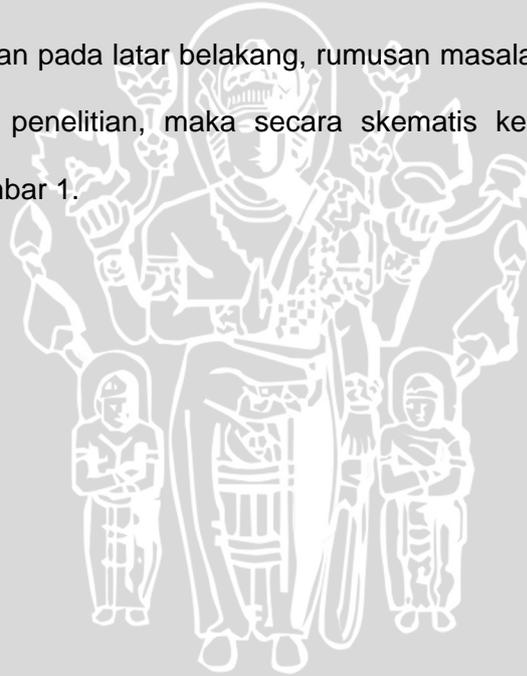
Menurut Nazir (2005: 360), dalam mengadakan analisa data perlu diingat bahwa data yang diperoleh hanya menambah keterangan terhadap masalah

yang ingin dipecahkan. Data tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut, sehingga analisis yang diberikan dapat pula berjenis-jenis. Informasi yang diperoleh dapat menjawab sebagian atau semua masalah, dapat menjawab secara sangat spesifik, dapat pun bersifat sangat umum.

Menurut Arikunto (2002: 213) apa pun jenis penelitiannya, riset deskriptif yang bersifat eksploratif atau developmental, caranya dapat sama saja karena data yang diperoleh sama. Yang berbeda adalah cara menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan.

3.9 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan tinjauan pustaka dan metode penelitian, maka secara skematis kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo adalah suatu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari jalan raya pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda.

Wilayah Situbondo mencakup 17 Kecamatan, 132 Desa, 4 Kelurahan dan 634 Dusun/Kampung. Dari 17 Kecamatan yang ada, 13 Kecamatan merupakan Kecamatan berpantai dengan jumlah Desa sebanyak 34 Desa terletak di pinggir pantai, sedang 4 Kecamatan tidak memiliki pantai yaitu Kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng, Situbondo dan Panji.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panarukan dan Kecamatan Mangaran. Kecamatan Panarukan memiliki 5 (lima) desa yaitu Desa Kilensari, Desa Peleyan, Desa Gelung, Desa Duwet dan Desa Sumberkolak. Namun yang digunakan sebagai lokasi penelitian yaitu hanya Desa Gelung. Ini dikarenakan merupakan daerah pantai yang banyak pemukiman nelayan serta tersebar nya program PEMP di daerah tersebut. Begitu pula pada Kecamatan Mangaran memiliki 6 (enam) Desa, namun yang digunakan sebagai lokasi penelitian hanya 2 (dua) desa karena 2 (dua) desa tersebut yang terdapat lebih banyak nelayan.

4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Situbondo terletak diujung timur pulau Jawa bagian utara yaitu antara $113^{\circ} 30'$ – $114^{\circ} 42'$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 35'$ – $7^{\circ} 44'$ Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Madura

- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Selatan : Bondowoso dan Banyuwangi
- Sebelah Barat : Probolinggo

Letak strategis Kabupaten Situbondo dimantapkan dengan posisinya pada jalan arteri primer Surabaya-Banyuwangi dan jalan kolektor sekunder kearah Bondowoso, menyebabkan arus informasi yang lancar baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Situbondo dan juga memberikan peluang besar untuk memajukan dan meningkatkan potensi wilayahnya di masa yang akan datang.

4.1.2 Keadaan Topografi

Kabupaten Situbondo daerah fisiknya memanjang dari barat ke timur sepanjang pantai selat Madura, dengan panjang \pm 160 Km, lebar rata-rata \pm 11Km dan luas daratannya 1.638,50 Km². Keadaan ini mempunyai ciri-ciri khusus yang menggambarkan kondisi daratannya terdiri dari pegunungan, dataran rendah dan pantai dengan tingkat kesuburan tanah dan pola yang berbeda. Kabupaten Situbondo juga mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan luas wilayah laut yang dikelola adalah 1.142,4 Km².

Kabupaten Situbondo merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-1250 m diatas permukaan air laut dengan kemiringan antara 0-45%. Ketinggian yang dominan antara 100-500 m diatas permukaan laut, yaitu seluas 42,34% dari luas Kabupaten Situbondo. Sedangkan luas wilayah ketinggian yang terkecil adalah ketinggian lebih dari 1000 m diatas permukaan laut, yaitu seluas 7,13% dari luas Kabupaten Situbondo, tersebar di Kecamatan Sumber Malang, Bungatan dan Banyuputih.

Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu wilayah utara merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan baik budidaya maupun penangkapan

ikan. Wilayah tengah bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian, sedangkan untuk wilayah selatan bertopografi miring mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.

4.2 Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2007 telah mencapai 631.381 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 311.377 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 320.004 jiwa. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Situbondo setiap Km² adalah 11.942 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Penduduk per Kecamatan, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Situbondo tahun 2007

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Rata-rata Jiwa/RT	Kepadatan Penduduk/Km ²
1.	Sumbermalang	27.251	9.543	3	210
2.	Jati Banteng	21.782	6.777	3	330
3.	Banyuglugur	21.888	6.927	3	300
4.	Besuki	57.927	19.131	3	2.221
5.	Suboh	25.182	8.809	3	817
6.	Mlandingan	22.491	8.162	3	568
7.	Bungatan	25.384	8.172	3	384
8.	Kendit	27.989	10.425	3	245
9.	Panarukan	50.558	16.237	3	927
10.	Situbondo	46.031	14.005	3	1.670
11.	Mangaran	30.378	11.665	3	851
12.	Panji	64.487	18.948	3	1372
13.	Kapongan	36.430	12.704	3	818
14.	Arjasa	39.765	13.184	3	184
15.	Jangkar	35.690	13.466	3	533
16.	Asembagus	48.593	15.431	3	409
17.	Banyuputih	49.555	14.669	3	103
	Jumlah	631.381	208.293	3	3

Sumber : Situbondo Dalam Angka 2007

Sedangkan untuk jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Situbondo Tahun 2007

No	Kelompok Umur (Th)	Jumlah Penduduk				Laki-laki+ Perempuan
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
1	0 - 4	23.196	7,45	19.497	6,09	42.693
2	5 - 9	24.630	7,91	24.091	7,53	48.721
3	10 - 14	26.554	8,53	23.684	7,40	50.238
4	15 - 19	23.416	7,52	23.205	7,25	46.621
5	20 - 24	22.720	7,30	23.745	7,42	46.465
6	25 - 29	21.864	7,82	24.343	7,61	46.207
7	30 - 34	22.339	7,17	24.919	7,79	47.256
8	35 - 39	27.793	8,93	38.588	12,06	66.381
9	40 - 44	25.120	8,07	22.920	7,16	48.040
10	45 - 49	21.852	7,02	29.170	9,12	51.022
11	50 - 54	23.435	7,53	17.506	5,47	40.941
12	55 - 59	14.791	4,75	13.302	4,16	28.093
13	60 - 64	13.848	4,45	13.309	4,16	27.157
14	65 +	19.819	6,36	21.727	6,70	41.546
	Jumlah	311.377	100	320.004	100	631.381

Dari data di atas dapat diketahui untuk penduduk perempuan lebih banyak (50,6%) dari penduduk laki-laki. Jika dilihat dari kelompok umur, maka jumlah penduduk laki-laki terbanyak ada pada kelompok umur 40-44 tahun. Sedangkan penduduk perempuan terbanyak pada kelompok umur 35-39 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi umur, maka jumlah penduduk juga semakin rendah. Hal ini juga dilihat dari persentase yang semakin menurun.

4.3 Potensi Perikanan

Kabupaten Situbondo membentang di pantai utara Jawa Timur sepanjang ± 163 Km yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang cocok untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan antara lain pembenihan, budidaya air payau, budidaya laut, penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan.

Perairan Situbondo terletak di mulut Selat Madura yang berbatasan dengan Selat Bali di sebelah timur sehingga mempunyai posisi yang strategis. Perairan ini mencakup wilayah yang cukup luas sehingga mempunyai potensi perikanan

tangkap yang besar. Hasil tangkapan ikan perairan Situbondo menunjukkan potensi penangkapan berbagai jenis ikan pelagis dengan tangkapan utama ikan laying, ikan tongkol, ikan kembung dan ikan lemuru. Potensi perikanan ini perlu dikelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari.

Berdasarkan pada potensi sumberdaya alam yang ada, maka pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Situbondo mengusahakan potensi kelautan dan perikanan menjadi berbagai kegiatan ekonomi yang perlu dipacu melalui peningkatan investasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu memberikan sumbangan yang lebih besar pada upaya Pembangunan Nasional dan Pembangunan Situbondo.

4.4 Keadaan Umum Dinas Kelautan dan Perikanan

4.4.1 Visi dan Misi

Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo adalah *"Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan Situbondo yang sejahteraan, maju, dan mandiri dengan bertumpu kepada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif, efisien dan berkesinambungan"*.

Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut.

Adapun misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo ditetapkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
2. Meningkatkan pengembangan data/informasi di bidang kelautan dan perikanan
3. Melaksanakan tugas-tugas dinas secara benar dan tepat waktu
4. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian serta pengelolaan aset daerah
5. Mewujudkan aparatur yang berdisiplin tinggi
6. Melaksanakan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
8. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pembinaan dalam rangka pengembangan budidaya perikanan
9. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pembinaan dalam rangka pengembangan perikanan tangkap
10. Menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan guna menjamin kesinambungan
11. Meningkatkan pengembangan sistem penyuluhan dan pengawasan perikanan
12. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pembinaan dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

4.4.2 Struktur Organisasi

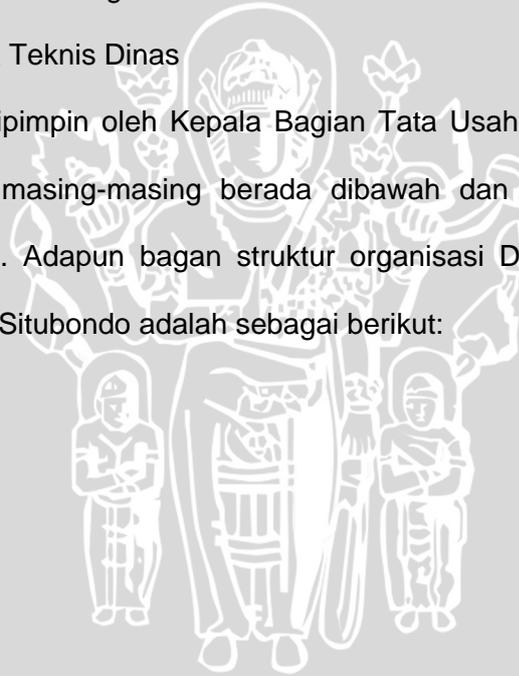
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok yaitu, *"Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah*

Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang Kelautan dan Perikanan”.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bidang-bidang
- d. Sub-sub bagian
- e. Seksi-seksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang masing-masing berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:





Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi DKP

4.4.3 Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang yg dilaksanakan antara lain:

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas

Kelautan dan Perikanan (DKP). Dimana bagian tata usaha disini membawahi Sub bagian umum (mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan) dan Sub bagian Perencanaan (mempunyai tugas perencanaan dan melaksanakan administrasi kepegawaian).

2. Bagian Kelautan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Pengelolaan sumber daya kelautan. Dimana bidang kelautan ini membawahi Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Pengembangan Pesisir (mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelautan di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Pesisir) dan Seksi Konservasi (mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Kelautan di bidang konservasi laut).
3. Bidang Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Pengelolaan sumber daya perikanan. Dimana bidang perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan ini membawahi Seksi Budidaya Perikanan (mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perikanan di bidang Budidaya perikanan) dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran (mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perikanan di bidang Pengolahan dan Pemasaran)
4. Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan mempunyai tugas mengawasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan sumberdaya perikanan. Dimana bidang ini membawahi Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan (mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan sumberdaya perairan di bidang Pengendalian Sumberdaya

Perairan) dan Seksi Perijinan dan Pengawasan Usaha Perikanan (mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan di bidang Perijinan dan Pengawasan Usaha Perikanan).

5. Untuk kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam suatu tugas teknis operasional tertentu. Unit Pelaksana Teknis Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pusat Pendaratan Ikan ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil sumberdaya laut.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini yaitu masyarakat nelayan di Desa Gelung, Desa Semiring dan Desa Tanjung Pecinan yang merupakan sasaran utama Program PEMP. Total responden yang diambil yaitu sebanyak 54 orang nelayan dari lokasi yang telah ditentukan, yaitu di Desa Semiring, Tanjung Pecinan, dan Desa Gelung.

Tabel 9. Karakteristik Responden

No.	Alamat	Umur (Th)	Pengalaman kerja	Pekerjaan Utama	Pendidikan	Pekerjaan lain
1.	Gelung	40	30	Nelayan	SD	Bakul ikan
2.	Gelung	45	28	Nelayan	-	Bakul ikan
3.	Gelung	45	20	Nelayan	-	-
4.	Gelung	48	25	Nelayan	SD	-
5.	Gelung	50	35	Nelayan	SD	Ternak sapi
6.	Gelung	50	35	Nelayan	SD	-
7.	Semiring	48	35	Nelayan	-	-
8.	Semiring	30	20	Nelayan	SD	-
9.	Semiring	45	20	Nelayan	SD	-
10.	Semiring	45	20	Nelayan	-	-
11.	Semiring	50	30	Nelayan	SD	-
12.	Semiring	55	25	Nelayan	-	-
13.	Semiring	40	20	Nelayan	SD	-
14.	Semiring	30	20	Nelayan	SD	Bakul ikan
15.	Semiring	55	35	Nelayan	SD	Bakul ikan
16.	Semiring	37	20	Nelayan	Tidak lulus SD	-
17.	Semiring	45	15	Nelayan	SD	-
18.	Semiring	25	10	Nelayan	SD	Bakul ikan
19.	Semiring	40	15	Nelayan	SD	-
20.	Semiring	47	20	Nelayan	SD	Ternak sapi
21.	Semiring	55	25	Nelayan	-	-
22.	Tj. Pecinan	50	20	Nelayan	SD	-
23.	Tj. Pecinan	50	25	Nelayan	-	Ternak sapi
24.	Tj. Pecinan	52	15	Nelayan	SD	-
25.	Tj. Pecinan	55	40	Nelayan	SD	Jual buah
26.	Tj. Pecinan	48	20	Nelayan	SD	-
27.	Tj. Pecinan	45	25	Nelayan	SD	-

Lanjutan Tabel 9. Karakteristik Responden

28.	Tj. Pecinan	30	15	Nelayan	SMP	-
29.	Tj. Pecinan	40	20	Nelayan	SMP	-
30.	Tj. Pecinan	40	20	Nelayan	SD	-
31.	Tj. Pecinan	32	20	Nelayan	SD	-
32.	Tj. Pecinan	35	15	Nelayan	SMP	-
33.	Tj. Pecinan	50	35	Nelayan	SD	-
34.	Tj. Pecinan	45	15	Nelayan	SMP	-
35.	Tj. Pecinan	45	15	Nelayan	SMP	-
36.	Tj. Pecinan	35	10	Nelayan	SD	-
37.	Tj. Pecinan	45	25	Nelayan	SD	-
38.	Tj. Pecinan	48	25	Nelayan	SMA	Ternak sapi
39.	Tj. Pecinan	50	30	Nelayan	-	Ternak sapi
40.	Tj. Pecinan	45	30	Nelayan	SD	-
41.	Tj. Pecinan	50	35	Nelayan	SD	Bakul ikan
42.	Tj. Pecinan	50	40	Nelayan	SD	-
43.	Tj. Pecinan	38	15	Nelayan	-	-
44.	Tj. Pecinan	48	30	Nelayan	SD	-
45.	Tj. Pecinan	45	21	Nelayan	SMP	-
46.	Tj. Pecinan	38	20	Nelayan	SMP	-
47.	Tj. Pecinan	36	15	Nelayan	-	Ternak sapi
48.	Tj. Pecinan	40	15	Nelayan	-	Ternak sapi
49.	Tj. Pecinan	49	30	Nelayan	SMP	-
50.	Tj. Pecinan	47	20	Nelayan	SMP	-
51.	Tj. Pecinan	45	20	Nelayan	SMA	Jual buah
52.	Tj. Pecinan	40	21	Nelayan	SMP	Pedagang
53.	Tj. Pecinan	40	30	Nelayan	SMP	-
54.	Tj. Pecinan	55	20	Nelayan	SMP	-

Sumber: Data primer diolah, 2009

Umur dan pengalaman kerja merupakan beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada usaha penangkapan ikan (nelayan) karena berkaitan erat dengan kemampuan, hasil yang diperoleh dalam usaha penangkapan ikan serta pengembangan perilaku sumberdaya manusia. Dari tabel diatas diketahui bahwa usia nelayan berkisar antara 25-55 tahun, dengan sebaran terbanyak pada usia 40-50 tahun. Rata-rata pengalaman kerja yang dimiliki nelayan adalah selama 23 tahun.

Sedangkan dilihat dari pekerjaan sampingan, sebanyak 33,33% nelayan mempunyai pekerjaan sampingan. Sebesar 11,11% mempunyai pekerjaan

sampingan sebagai bakul ikan, sebagai pedagang 5,55% dan terbanyak sebagai peternak sapi sebesar 12,96%.

Untuk tingkat pendidikan nelayan yang tidak sekolah sebanyak 11 orang (20,3%), tidak lulus SD sebanyak 1 orang (1,85%), lulus SD sebanyak 28 orang (51,8%), lulus SMP sebanyak 12 orang (22,2%) dan lulus SMA sebanyak 2 orang (3,70%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan nelayan relatif rendah. Hal ini terlihat pada persentase yang semakin rendah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

5.2 Profil Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Indonesia sebagai negara maritim yang mencakup areal laut yang sangat luas yang memiliki sumberdaya kelautan yang berlimpah. Pada saat ini pengelolaan wilayah pesisir telah mendapat perhatian yang cukup besar dengan skala prioritas yang tinggi, hal ini karena wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki arti yang sangat strategis dengan potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya.

Masyarakat pesisir terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, pengolah ikan, pengusaha jasa perikanan, pengelola wisata bahari serta pengusaha penunjang lainnya yang berlokasi di daerah sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil. Data kondisi masyarakat pesisir di Indonesia dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Data Kondi Masyarakat Pesisir

No.	Kondisi Masyarakat Pesisir	Jumlah
1.	Desa Pesisir	8.090 desa
2.	Masyarakat pesisir:	16.420.000 jiwa
	- Nelayan	4.015.320 jiwa
	- Pembudidaya	2.671.400 jiwa
	- Masyarakat pesisir lainnya	9.733.280 jiwa
3.	Prosentase yang hidup di bawah garis kemiskinan	5.254.400 jiwa

Sumber: Pedum PEMP Departemen Kelautan dan Perikanan 2007

Persentase kemiskinan masyarakat pesisir memberikan pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan nasional yang sekarang mencapai 17,75% dari total 222 juta penduduk Indonesia (BPS 2006). Kemiskinan masyarakat pesisir berakar pada antara lain keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif.

Dengan potensi sumberdaya alam yang besar seharusnya secara umum masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang sejahtera, namun kenyataannya masyarakat pesisir terutama nelayan hingga saat ini masih memiliki masalah hidup yang khas yaitu selalu dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang disebabkan belum maksimal dalam mengelola potensi sumberdaya laut dan pesisir secara optimal.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pengembangan kultur kewirausahaan, penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Pada awalnya program PEMP diinisiasi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian masyarakat pesisir, yang difokuskan pada penguatan modal melalui perguliran Dana Ekonomi Produktif (DEP). Pengelolaan DEP dilakukan oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mina (LEPPM3) yang sejatinya dibentuk sebagai cikal bakal milik masyarakat pesisir.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana di Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dengan program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir yaitu melalui program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang kesemuanya bertujuan untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan keluarganya.

Pada dasarnya, program PEMP dirancang untuk tiga periode. Periode pertama, 2001-2003, merupakan periode inisiasi dengan fokus pada penggalangan partisipasi dan penyadaran masyarakat, serta perintisan kelembagaan yang diharapkan sebagai cikal bakal yang akan memayungi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Periode kedua, yang berlangsung dari 2004 sampai 2006, merupakan periode institusionalisasi. Dalam kurun waktu tiga tahun periode ini, program akan difokuskan pada revitalisasi kelembagaan melalui peningkatan status LEPPM3 menjadi berbadan hukum koperasi. Periode ketiga, merupakan periode diversifikasi usaha yang rencananya dimulai pada tahun 2007-2009. Periode ini mulai dibentuk unit-unit usaha yang bernaung di bawah LEPPM3 yang telah berbadan hukum koperasi.

5.2.1 Tujuan PEMP

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan, penggalangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan serta diversifikasi usaha yang berkelanjutan dan berbasis sumberdaya lokal.

5.2.2 Sasaran

Sasaran Program PEMP adalah 1) Koperasi sebagai sasaran antara dan 2) sasaran akhir yaitu masyarakat pesisir yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung menurut skala prioritas dengan usaha skala mikro dan kecil yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan, pengelolaan wisata bahari serta usaha penunjang lainnya yang berlokasi di daerah sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil.

5.2.3 Organisasi Pengelola Program

Dalam pelaksanaannya, PEMP dikelola oleh organisasi yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan dengan susunan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat adalah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang bertindak sebagai penanggungjawab dan pembina program di tingkat nasional. Penanggungjawab kegiatan ini adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Dirjen KP3K) yang bertugas mengelola program di tingkat nasional, seperti penyusunan pedoman umum, melaksanakan sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan Kabupaten/kota yang menangani Program PEMP. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi sebagai representasi DKP di daerah bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi juga mengusulkan kabupaten/kota calon penerima program PEMP tahun berikutnya sesuai dengan evaluasi tahun berjalan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota sebagai penanggung jawab operasional program bertugas untuk menetapkan Konsultan Manajemen Kabupaten/kota, menetapkan koperasi pelaksana, sosialisasi dan publikasi tingkat kabupaten/kota, pembentukan LKM (bagi kabupaten/kota baru penerima program PEMP), rekrutmen Tenaga Pendamping Desa (TPD), pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

3. Konsultan Manajemen

Konsultan Manajemen (KM) Kabupaten/kota berfungsi membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dalam aspek teknis dan manajemen pelaksanaan Program PEMP. Tugas KM adalah: (1) membuat perencanaan kegiatan PEMP; (2) melaksanakan pelatihan kegiatan usaha bagi masyarakat pesisir; (3) menginventarisasi potensi dan kebutuhan masyarakat pesisir dalam modal usaha, pemetaan jalur produksi, pasar, dan konsumen; (4) mengembangkan program melalui kerjasama dengan berbagai pihak; (5) melakukan revitalisasi LEPPM3 menjadi badab hukum koperasi; dan (6) fasilitas pembentukan koperasi baru bagi kabupaten/kota yang belum mempunyai koperasi.

4. Tenaga Pendamping Desa (TPD)

TPD merupakan tenaga profesional di bidangnya yang bersedia tinggal di tengah masyarakat sasaran dan mendampingi masyarakat secara terus-menerus (selama kegiatan program). Tugas TPD adalah: (1) membuat perencanaan kegiatan pendampingan masyarakat; (2) mempersiapkan masyarakat pesisir untuk mengakses kredit pada LKM; (3) membantu masyarakat pesisir dalam menyusun proposal kegiatan usaha; (4) mendampingi masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, baik dalam proses produksi maupun pemasaran; dan (5) membuat laporan perkembangan setiap bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

5. Koperasi

Koperasi sebagai komponen utama pelaksana Program PEMP di daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan, koperasi harus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab

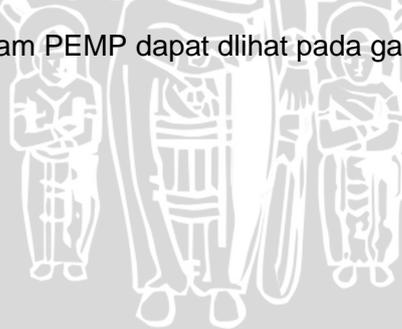
operasional di daerah dan juga dengan lembaga perbankan/pembiayaan sebagai mitra usaha mereka.

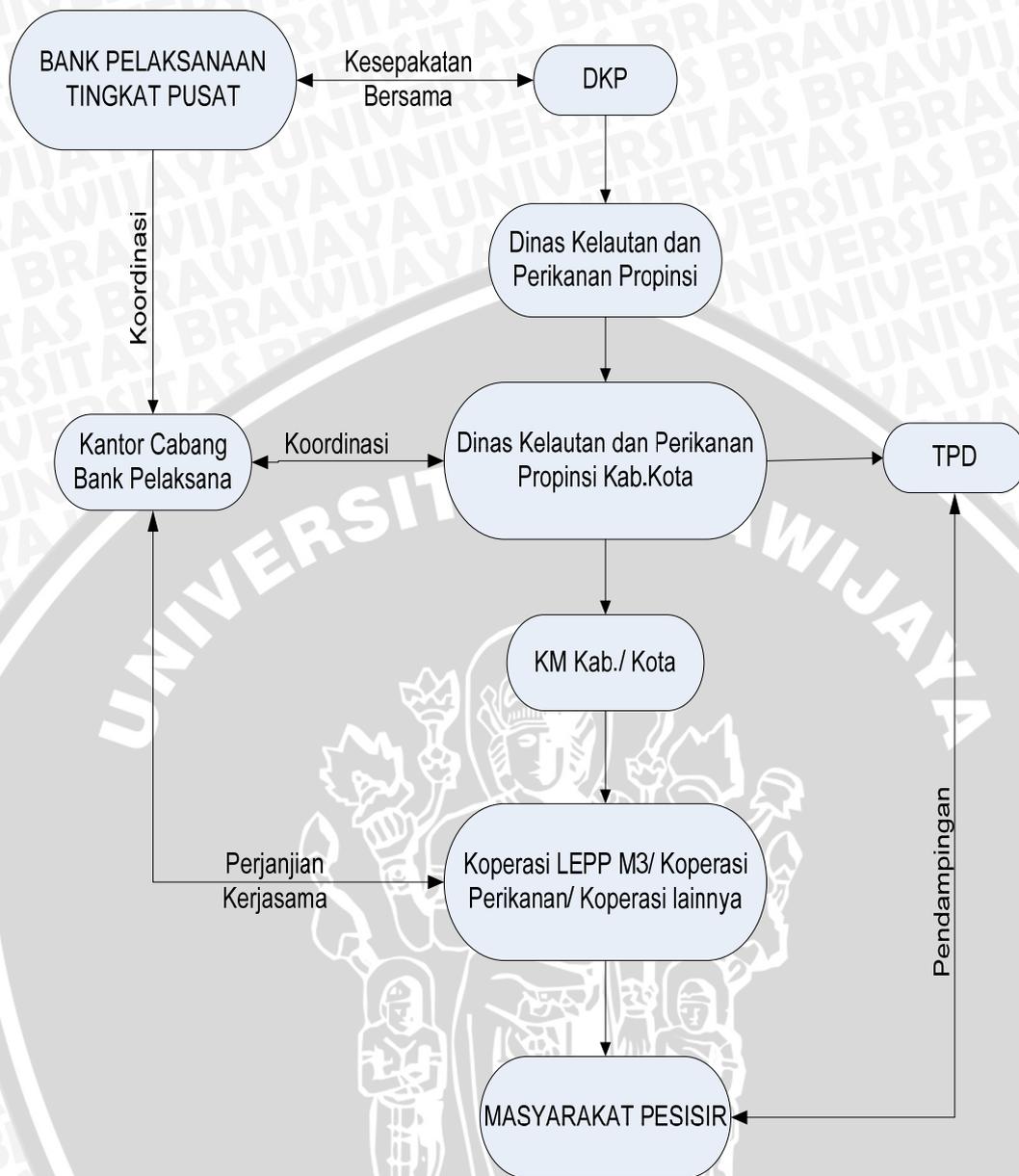
Dalam menjalankan fungsinya koperasi menerima DEP sebagai hibah yang dijaminan kepada perbankan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan tersebut. Dana pinjaman tersebut selanjutnya disalurkan kepada masyarakat pesisir melalui LKM milik koperasi yang bersangkutan.

6. Bank Pelaksana

Bank Pelaksana adalah lembaga keuangan perbankan yang ditetapkan oleh DKP dengan tugas dan fungsi: (1) menyediakan kredit bagi koperasi sebagai konsekuensi dari adanya DEP yang dijaminan untuk kegiatan penguatan modal; (2) menyalurkan DEP langsung dengan pola hibah melalui rekening koperasi yang ada di Bank Pelaksana untuk kegiatan pelaksanaan BPR Pesisir, SPDN, Kedai Pesisir dan atau Bantuan Sarana lainnya; dan (3) melakukan pendampingan teknis dan administratif kepada LKM.

Dari susunan, tugas dan fungsi yang telah dijelaskan, maka bagan organisasi pengelola Program PEMP dapat dilihat pada gambar 3.





Gambar 3. Bagan Organisasi Pengelola Program PEMP 2007

5.3 Evaluasi Pelaksanaan Program PEMP di Kabupaten Situbondo

Pada penjelasan sebelumnya, jika dilihat dari model pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dapat dikatakan bahwa model yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman



Program PEMP yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada evaluasi terhadap salah satu Program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, yaitu pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Walaupun dalam setiap proses perumusannya dan implementasinya telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menyajikan jenis informasi yang diperlukan untuk menarik kesimpulan dan menilai secara obyektif pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya dan hasil evaluasi ditujukan menjadi umpan balik yang memungkinkan Program tersebut disempurnakan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa adanya empat macam evaluasi yaitu perencanaan program, pemantauan program, penilaian dampak dan efisiensi sumber atau biasa disebut efisiensi “ekonomi”. Akan tetapi jenis evaluasi yang peneliti lakukan adalah evaluasi pada tahap purna pelaksanaan yaitu penilaian dampak terhadap Program tersebut serta pemantauan program melalui wawancara dan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, implementasi program dan pemantauan diarahkan pada proses sejauh mana kegiatan yang direncanakan (pelaksanaan) tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitiannya, peneliti memfokuskan Program tersebut hanya kepada masyarakat nelayan. Jadi, bagaimana penilaian masyarakat nelayan terhadap adanya program PEMP tersebut. Aspek yang dinilai dan dianalisa pada jenis penelitian evaluasi ini adalah bagaimana hasil pelaksanaan dengan rencana.

Yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan beberapa tahap yaitu (1) sasaran Program PEMP; (2) pendekatan program; (3) prinsip pengelolaan dan pengembangan; dan (4) pendampingan.

5.3.1 Sasaran Program PEMP

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sasaran Program PEMP adalah 1) Koperasi sebagai sasaran antara dan 2) sasaran akhir yaitu masyarakat pesisir yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung menurut skala prioritas dengan usaha skala mikro dan kecil yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan, pengelolaan wisata bahari serta usaha penunjang lainnya yang berlokasi di daerah sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kabupaten Situbondo telah melaksanakan Program PEMP mulai tahun 2001, dengan lokasi sasaran sebagai berikut:

a. Program PEMP 2001

- Desa Gelung Kecamatan Panarukan
- Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih
- Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih

b. Program PEMP 2002

- Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran
- Desa Semiring Kecamatan Mangaran
- Desa Ketah Kecamatan Suboh

c. Program PEMP 2003

- Desa Jangkar Kecamatan Jangkar

- Desa Landangan Kecamatan Kapongan
- Desa Bletok Kecamatan Bungatan

d. Program PEMP 2004

1. Pemberian Pinjaman Dana Ekonomi Produktif
 - Kecamatan Mlandingan
 - Kecamatan Besuki
 - Kecamatan Banyuglugur
2. Pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan di Pondok Mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih

e. Program PEMP 2005

1. Persiapan Solar Packed Dealer untuk Nelayan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan.
2. Persiapan Pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki
3. Persiapan Pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan di Desa Kalbut/Semiring Kecamatan Mangaran
4. Penyaluran Dana Ekonomi Produktif dengan lokasi sasaran seKabupaten Situbondo

f. Program PEMP 2006

- Penyaluran Dana Ekonomi Produktif dengan lokasi sasaran seKabupaten Situbondo.

Dari penelitian yang dilakukan, Program PEMP telah berjalan sesuai/tepat dengan sasaran yang ditetapkan. Dimana 1) Kopersai LEPPM3 sebagai sasaran antara dan 2) sasaran akhir yaitu masyarakat pesisir yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang berorientasi pada sektor kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan. Dalam hal ini masyarakat nelayan yang menjadi sasaran akhir.

5.3.2 Pendekatan Program

Pendekatan yang digunakan pada Program PEMP adalah:

- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pelestarian pembangunan ekonomi, masyarakat dan wilayah.
- Kemandirian masyarakat dalam pembangunan masyarakat dan wilayah.
- Kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam pengembangan kegiatan.

Dari pendekatan program yang digunakan pada Program PEMP dapat dinilai/dievaluasi sebagai berikut:

- Masyarakat ikut serta/berpartisipasi dalam proses pelaksanaan, pengawasan dan dalam pengambilan keputusan. Ini dilihat dari proses pelaksanaan yang mengikutsertakan masyarakat dimana mereka sebagai sasaran program. Selain itu, masyarakat juga melakukan pengawasan terhadap jalannya program seperti adanya kecurangan dari pihak LEPPM3 dan ketua kelompok sasaran. Pengambilan keputusan juga dilakukan secara bersama-sama mengenai keputusan dalam perubahan kepengurusan LEPPM3 dan keputusan mengenai cara dan waktu pengembalian dana pinjaman.
- Dalam kemandiriannya masyarakat masih belum sepenuhnya terbentuk. Selama ini masyarakat masih belum mampu menjalankan program dengan baik dan masih saja bergantung pada tengkulak/nelayan juragan. Meskipun dengan adanya program PEMP ini dan penyuluhan sudah sering dilakukan, masyarakat masih tetap meminjam pada tengkulak/juragan dan itu tidak bisa dirubah.
- Adanya kemitraan yang dilakukan antar masyarakat, aparat pemerintah dan swasta. Ini dibuktikan dari kemitraan yang terjadi antar masyarakat dan antar

bank (lembaga keuangan perbankan) dengan koperasi dalam pelaksanaan program.

Penilaian pendekatan Program PEMP secara ringkas dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Penilaian Pendekatan Program PEMP

No.	Variabel	Hasil Analisis	Keterangan
1	Partisipasi	Masyarakat berpartisipasi pada proses pelaksanaan, pengawasan dan dalam pengambilan keputusan. Dapat dilihat dari hasil yang diperoleh yaitu 90,7% masyarakat ikut berpartisipasi pada proram ini.	Telah sesuai
2	Kemandirian	100% masyarakat masih bergantung pada tengkulak/juragan. Dibuktikan dari masih banyaknya masyarakat yang meminjam pada juragan.	Tidak sesuai
3	Kemitraan	Terjadinya kemitraan antar masyarakat, swasta dan pemerintah	Telah sesuai

5.3.3 Prinsip Pengelolaan dan Pengembangan Program

Prinsip pengelolaan dan pengembangan program PEMP adalah:

- *Acceptable*: Pilihan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi sumberdaya, kelayakan usaha serta kebutuhan dan kemampuan sehingga memperoleh dukungan masyarakat.

Dari prinsip ini, masyarakat mendukung atas adanya program PEMP. Akan tetapi, kenyataannya program yang diberikan hanya pinjaman dana saja dan ini tidak berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Pinjaman dana tersebut hanya digunakan sebagai modal melaut saja.

Pinjaman dana itu juga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sumberdaya yang ada yang merupakan daerah pantai. Dimana sebagian besar masyarakat sebagai nelayan. Sehingga kebutuhan masyarakat seperti perahu, alat tangkap dan sebagainya tidak terpenuhi. Dari penjelasan ini dapat dinilai bahwa daya dukung masyarakat kurang tinggi.

- *Transparency*: Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka, diinformasikan dan diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut memantau.

Masyarakat mengetahui adanya program ini dari informasi yang diberikan oleh pihak LEPPM3. Selain itu pengelolaan dilakukan secara terbuka. Ini dibuktikan dari sosialisasi tentang PEMP hingga saat pinjaman itu turun ke masyarakat. Sehingga masyarakat ikut dalam mengawasi jalannya program.

- *Accuntability*: Pengelolaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan program tersebut, ternyata masyarakat tidak mengetahui secara jelas tentang seberapa besar dana yang digunakan/diberikan untuk Program PEMP yang nantinya dana tersebut disalurkan/ diberikan pada masyarakat nelayan. Masyarakat hanya mengetahui bahwa ada pinjaman dana dari Program PEMP tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat dinilai bahwa prinsip ini tidak berjalan/tidak sesuai.

- *Responsiveness*: Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atas beban penduduk miskin.

Tetapi dalam kenyataannya, ini belum sesuai. Tidak semua masyarakat nelayan yang mendapat bantuan dari program PEMP ini. Khususnya pada masyarakat nelayan miskin atau pada nelayan pandega (tidak punya kapal/perah). Bantuan dana yang diberikan sebagian besar pada masyarakat nelayan kaya atau nelayan juragan (punya banyak kapal/perahu). Karena mereka beranggapan jika masyarakat miskin tidak bisa mengembalikan dana tersebut/telat dalam mengembalikan dana itu.

- *Quick disbursement*: Penyampaian bantuan kepada masyarakat secara cepat dan tepat.

Prinsip ini belum sesuai dengan fakta yang ada. Masyarakat tidak cepat menerima bantuan dan bantuan itu juga tidak tepat seperti pada pinjaman dana bagi nelayan juragan/kaya. Untuk nelayan kaya/juragan, mereka boleh meminjam dana lebih dari 5 juta sedangkan nelayan miskin/pandega tidak boleh. Ini dibuktikan dari penyampaian bantuan oleh masyarakat nelayan pandega yang juga ingin menerima pinjaman tersebut tetapi masih belum menerima.

- *Democracy*: Proses pemilihan peserta dan kegiatan PEMP dilakukan secara musyawarah.

Prinsip ini telah sesuai dengan fakta yaitu dengan pengambilan keputusan secara musyawarah tentang cara dan batas waktu pengembalian serta pemilihan peserta sesuai dengan musyawarah yang dilakukan bersama masyarakat.

- *Sustainability*: Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal dan berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam kenyataannya setelah diteliti, ternyata program ini belum dapat memberikan manfaat secara optimal. Program ini tidak berpengaruh pada pendapatan, pendidikan ataupun akses pada masyarakat. Khususnya pada masyarakat nelayan pandega yang belum menerima langsung bantuan program PEMP tersebut.

- *Equality*: Pemberian kesempatan kepada kelompok lain yang belum memperoleh kesempatan agar semua masyarakat merasakan manfaat langsung.

Pada kenyataannya program ini merupakan program bergulir dimana pinjaman dana yang nantinya digulirkan ke kelompok lain. Ini dibuktikan dari

banyaknya kelompok (> 5 kelompok) nelayan yang mendapat pinjaman dana tersebut. Yang awalnya dari satu kelompok menjadi lebih dari satu kelompok.

- *Competitiveness*: Setiap ketentuan dalam pemanfaatan dana ekonomi produktif masyarakat diharapkan dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan jujur dalam mengajukan usulan kegiatan yang layak.

Akan tetapi pada nyatanya, dalam mengajukan usulan bantuan ataupun kegiatan, masyarakat tidak melakukan dengan jujur. Semisal pada usulan pinjaman dana yang katanya digunakan untuk membeli alat tangkap. Tetapi usulan itu ternyata tidak sesuai dengan harga alat tangkap yang ada yang dijual di toko-toko.

Dari prinsip pengelolaan dan pengembangan program PEMP tersebut, maka untuk meringkas uraian tersebut dibuatlah tabel analisis penilaian. Penilaian prinsip pengelolaan dan pengembangan program PEMP dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Penilaian Prinsip pengelolaan dan pengembangan program PEMP

No.	Variabel	Analisis Responden	Keterangan
1.	<i>Acceptable</i>	Hanya pinjaman dana saja yang diberikan dan ini tidak berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat.	Tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan.
2.	<i>Transparency</i>	Masyarakat ikut dalam mengawasi jalannya program	Sesuai dengan prinsip
3.	<i>Accountability</i>	Dalam pengelolaannya, LEPPM3 tidak mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.	Tidak sesuai dengan prinsip
4.	<i>Responsiveness</i>	Tidak semua masyarakat nelayan yang mendapat bantuan seperti pada nelayan miskin.	Tidak sesuai
5.	<i>Quick disbursement</i>	Masyarakat tidak cepat menerima bantuan dan bantuan itu juga tidak tepat	Tidak sesuai
6.	<i>Democracy</i>	Telah sesuai dengan fakta yaitu dengan pengambilan keputusan secara musyawarah	Sesuai
7.	<i>Sustainability</i>	Program ini belum dapat memberikan manfaat secara optimal.	Tidak sesuai

Lanjutan Tabel 12. Penilaian Prinsip pengelolaan dan pengembangan program PEMP

8.	<i>Equality</i>	Program ini telah bergulir pada kelompok lain.	Sesuai
9.	<i>Competitiveness</i>	Dalam mengajukan usulan bantuan ataupun kegiatan, masyarakat tidak melakukan dengan jujur.	Tidak sesuai

5.3.4 Pendampingan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir bertujuan untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat pesisir menuju masyarakat yang lebih maju dan mandiri, oleh sebab itu fungsi pendampingan yang dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen berperan sangat penting dalam pelaksanaan program. Pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa peran pendamping sangatlah penting dalam pelaksanaan program ini. Tetapi pada kenyataannya, pendampingan itu tidak dilakukan. Seperti Perguruan Tinggi sebagai fasilitator pengembangan SDM dan LSM selaku pengawas disini tidak dimasukkan dalam Pelaksanaan Program PEMP di Kabupaten Situbondo. Sehingga yang seharusnya dapat merubah pola pikir dan perilaku masyarakat menjadi tidak berubah dan tidak mandiri.

Penilaian program selain dari penilaian 4 tahap pelaksanaan tersebut, penilaian program juga dilihat dari hasil wawancara kepada pihak DKP. Dimana penilaian ini berdasarkan pada definisi teori yang telah ada yaitu yang mencakup proses penilaian yang sistematis, pengumpulan bukti-bukti terhadap adanya perubahan dan pengumpulan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat, didapat dari hasil wawancara terhadap masing-masing variabel. Untuk meringkas uraian itu menjadi suatu hasil yang mudah maka dibuatlah data analisis penilaian

terhadap program tersebut. Dimana data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 13:

Tabel 13. Data Analisis Penilaian masing-masing variabel terhadap program PEMP

No.	Variabel	Analisis	Keterangan
1.	Pemberian Nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Program • Proses jalannya program • Pelaksanaan • Hasil pelaksanaan • Waktu pelaksanaan 	Pada awalnya, yaitu pada tahun 2001-2003 proses perencanaan, jalannya program, waktu hingga pada hasil pelaksanaan telah sesuai pedoman yang ada yaitu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tetapi untuk tahun berikutnya hingga sekarang program ini tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Ini juga dapat dilihat pada respon masyarakat terhadap program PEMP. Yang menunjukkan 100% masyarakat senang akan adanya program ini dan 75% masyarakat menilai program ini tidak berjalan lancar.
2.	Pemberian Atribut	<ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil yang dicapai 	Dari hasil yang diperoleh selama adanya program yaitu tidak ada pemberian atribut.
3.	Pemberian Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil yang dicapai 	Tidak ada apresiasi dari pihak pemerintah pusat.
4.	Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat/SDM • Lingkungan • Pendapatan • Pendidikan • Kesehatan • Akses 	Dalam hal ini tidak ada perubahan yang terjadi. Seperti pada pendapatan, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan akses. Dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan bahwa 84,8% masyarakat mengatakan program ini tidak berpengaruh pada pendapatan, pendidikan, kesehatan dan akses.
5.	Pengumpulan bukti-bukti ada tidaknya perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti-bukti tercapainya program 	Dari hasil evaluasi yang dilakukan, bukti tercapainya program yaitu tahun 2001-2003 seperti pada pengembalian dana yang tepat dan pengguliran dana yang terjadi. Tetapi tidak ada perubahan yang terjadi dengan adanya program itu.

Lanjutan Tabel 13. Data Analisis Penilaian masing-masing variabel terhadap program PEMP

6.	Pengumpulan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap perubahan 	Informasi yang menunjukkan perubahan dengan adanya program PEMP ini yaitu dilihat dari hasil dampak yang terjadi pada kesejahteraan masyarakat dimana pada intinya program ini tidak memberikan dampak baik pada masyarakat.
----	-----------------------	--	--

Dari analisis penilaian tersebut, diketahui bahwa program ini berjalan lancar hanya pada tahun 2001-2003. Untuk selanjutnya hingga sekarang, program ini tidak lagi berjalan sesuai dengan pedoman yang ada. Seperti juga pada lokasi sasaran yang ditetapkan. Tidak semua lokasi yang menerima program tersebut. Hanya beberapa lokasi saja seperti Desa Gelung, Desa Semiring, dan Desa Tanjung Pecinan. Yang menerima program tersebut.

Sedangkan pada Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir telah dijelaskan bahwa program ini telah dimulai sejak tahun 2001 dengan berbagai penyempurnaan seiring dengan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun instansi-instansi lain terkait lainnya. Sesuai dengan periodisasi program PEMP, maka mulai tahun 2007 sampai 2009 diarahkan pada kegiatan diversifikasi usaha oleh koperasi melalui pembentukan unit-unit usaha seperti LKM, SPDN (*Solar Packed Dealer untuk Nelayan*), Kedai Pesisir, Klinik Bisnis dan Bantuan Sarana Usaha Perikanan lainnya.

Pada kenyataannya setelah dilakukan evaluasi, ternyata model pemberdayaan yang diberikan hanya pada pinjaman modal dan SPDN yang itupun hanya beberapa lokasi saja yang menerima dan berjalan lancar. Akan tetapi pinjaman modal dari program PEMP tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar. Ini disebabkan karena ada beberapa kendala yang dihadapi.

Kendala tersebut diantaranya pada:

- Sosialisasi program PEMP tentang pinjaman modal

Sosialisasi yang dilakukan LEPPM3, menimbulkan masalah yang membuat masyarakat nelayan tidak mengembalikan pinjaman dana tersebut. Ini disebabkan karena ada salah satu pengurus LEPPM3 yang mengatakan pada masyarakat jika dana PEMP itu adalah milik masyarakat jadi uang tersebut tidak perlu dikembalikan. Karena inilah masyarakat tidak mengembalikan pinjaman dana PEMP tersebut.

- Kepengurusan LEPPM3

Kepengurusan LEPPM3 yang kurang baik dalam menjalankan program PEMP. Seperti kurang tegasnya pihak LEPPM3 mengenai administrasi dalam pengembalian dana. Dimana masyarakat dibebaskan untuk mengembalikan dana kapanpun saja selama batas waktu 1 tahun. Tetapi dalam waktu yang diberikan, masyarakat juga tidak dapat mengembalikan dana tersebut karena penghasilan yang didapat selama melaut tidak mencukupi. Selain itu, diperkuat dengan tidak adanya surat perjanjian sehingga jika sewaktu-waktu masyarakat tidak dapat membayar sesuai batas waktu pengembalian maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ditambah lagi dengan adanya unsur KKN yang dilakukan oleh seseorang dari pihak LEPPM3 yang tidak menyetorkan dana pengembalian dari masyarakat ke DKP. Dari sinilah yang membuat pinjaman dana tersebut tidak bergulir pada masyarakat nelayan lainnya.

Begitu pula pada pembangunan Solar Packed Dealer yang direncanakan ternyata tidak berjalan lancar. Untuk pembangunan Solar Packed Dealer (disebut juga Pom Mini) di Pondok Mimbo telah dilaksanakan. Pada awalnya, hampir semua masyarakat membeli solar di Pom tersebut karena harga lebih rendah dari solar yang dijual di pom-pom umum. Tetapi, setelah terjadi penurunan harga

BBM, nelayan malah tidak lagi membeli di pom tersebut. Karena penurunan harga BBM itu tidak berpengaruh pada harga solar di POM Mini tersebut. Harga solar di POM Mini yang awalnya lebih murah dari harga solar di POM Umum, tetapi setelah penurunan itu, harganya malah tidak turun atau sama dengan harga di POM Umum. Selain itu, disebabkan karena takaran solar per liter di POM Mini sedikit lebih rendah dibanding solar per liter di POM Umum. Bagi masyarakat nelayan, lebih baik membeli di POM Umum yang ukuran per liternya sesuai dengan ukuran sebenarnya daripada di POM Mini yang ukuran per liternya kurang. Karena alasan itulah Pom Mini tidak lagi diminati para konsumen khususnya nelayan sehingga POM tersebut tutup dan tidak beroperasi lagi. Dari alasan itulah maka persiapan pembangunan Solar Packed Dealer untuk lokasi lainnya tidak dilakukan.

Selain itu, juga tidak ada perubahan yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga seperti pemberian atribut dan apresiasi tidak diberikan oleh pemerintah daerah.

Selain penilaian terhadap pelaksanaan program PEMP tersebut, penilaian program juga dilakukan berdasarkan dampak yang terjadi pada kesejahteraan masyarakat yang dinilai dari pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses. Data analisis penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Data Analisis Penilaian masing-masing variabel terhadap kesejahteraan masyarakat (Pendapatan, pendidikan, kesehatan dan akses)

No.	Variabel	Sebelum ada pemberdayaan	Setelah ada pemberdayaan
1.	Pendapatan	Pendapatan yang diperoleh rata-rata untuk juragan Rp. 5.389.250/bulan. Sedangkan pada nelayan pandega Rp. 786.985,8/bulan.	Program ini tidak berpengaruh pada pendapatan. Pendapatan nelayan yang diperoleh tetap Rp. 5.389.250/bulan untuk juragan dan pandega Rp. 786.985,8/bulan. Pendapatan yang diperoleh tergantung pada kondisi laut.
2.	Pendidikan	Tingkat pendidikan nelayan relatif rendah. Ini dibuktikan dari hasil penelitian terhadap masyarakat nelayan yaitu pada karakteristik responden.	Tidak ada perubahan yang terjadi/program ini tidak mempengaruhi pendidikan. Yang mana tingkat pendidikan nelayan masih relatif rendah.
3.	Kesehatan	Kesehatan masyarakat tergantung pada kondisi tubuh. Untuk pola makan, meskipun penghasilan bertambah, pola makan mereka tidak berubah. Tergantung pada keinginan mereka.	Tidak ada perubahan dari adanya program PEMP. Kesehatan, pola makan semuanya tergantung pada diri mereka sendiri
4.	Akses	Sama halnya dengan masyarakat lain. Akses ke RS/Puskesmas, tetap lancar. Hanya biasanya untuk masyarakat kurang mampu, pelayanan yang diberikan kurang maksimal.	Program ini tidak mempengaruhi akses yang dilakukan masyarakat. Sama halnya dengan masyarakat lain. aksesnya lancar hanya kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk yang kurang mampu.

Dari data diatas, telah diketahui bahwa Program ini tidak memberikan manfaat secara optimal pada masyarakat nelayan khususnya pada tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan dan akses. Pendapatan nelayan didapat dari hasil melaut bukan karena pinjaman dana yang diberikan. Pinjaman itu

digunakan sebagai modal untuk melaut. Sedangkan modal itu tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh nelayan. Masyarakat nelayan mengatakan, bahwa ada musim-musim tertentu dimana tidak ada ikan sama sekali sehingga hasil yang diperoleh tidak ada. Jadi, penghasilan nelayan juga tidak menentu. Rata-rata pendapatan nelayan juragan sebelum dan setelah adanya program PEMP yang diperoleh sebesar Rp. 5.389.250/bulan. Sedangkan pada nelayan pandega, rata-rata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 786.985,8/bulan. Pendapatan mereka berubah bukan karena adanya program PEMP akan tetapi karena kondisi laut. Daftar pendapatan nelayan dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8.

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan nelayan. Khususnya pada anak-anak mereka. Meskipun para orangtua berpendidikan relatif rendah, mereka (para nelayan) akan terus membiayai anaknya sekolah meskipun Program itu tidak ada. Karena pinjaman dari program itu, digunakan untuk modal melaut tidak berpengaruh pada pendidikan. Apalagi sekarang, mereka sangat bersyukur biaya sekolah hingga SMP gratis. Kebanyakan nelayan berpikir, bahwa lulus dari SMP sudah cukup.

Begitu pula untuk tingkat kesehatan dan akses masyarakat nelayan. Program PEMP ini tidak berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat. Dari penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir khususnya bagi nelayan tidak berjalan lancar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

5.4 Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Tingkat pemberdayaan masyarakat terhadap Program PEMP dilihat berdasarkan Respon masyarakat tentang program PEMP, motivasi, kesejahteraan serta partisipasi masyarakat.

- Respon masyarakat tentang Program PEMP

Dari hasil yang didapat untuk variabel pertama tentang respon masyarakat terhadap Program PEMP yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pada intinya 49 orang (90%) masyarakat nelayan mengetahui adanya Program tersebut dan 54 orang (100%) masyarakat senang dengan dilaksanakannya Program PEMP tersebut. Akan tetapi sebagian besar (75%) masyarakat mengatakan bahwa program itu tidak berjalan baik dan tidak berdampak baik bagi kesejahteraan nelayan. Karena masyarakat mengatakan bahwa :

"Begini mbak,, awalnya sekitar tahun 2001-2003, Program ini berjalan baik. Dari pengembalian dana yang tepat waktu hingga pada perguliran dana kepada masyarakat lainnya. Tapi, setelah itu, programnya gak jalan lagi. Uangnya diambil sendiri oleh ketua kelompok. Yang biasanya uang itu (pengembalian dana) disetorkan pada pihak LEPP-M3, ternyata tidak dikasihkan (tidak disetorkan). Jadi seperti itulah yang bikin mandek (tidak jalan lagi). Dan lagi ada unsur-unsur KKN yang dilakukan oleh salah satu orang di LEPP-M3".

Respon masyarakat tentang Program PEMP sesuai dengan skor yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Respon masyarakat tentang Program PEMP

No	Pertanyaan	Jawaban										jumlah
		SS (4)	%	S (3)	%	KS (2)	%	TS (1)	%	TT (0)	%	
1.	Masyarakat tahu ada program PEMP	49	90,7	3	5,5	0	0	0	0	2	3,7	54
2.	Program tersebut dilaksanakan di daerah ini	49	90,7	3	5,5	0	0	0	0	2	3,7	54
3.	Program ini diberikan untuk nelayan	41	75,9	8	14,8	0	0	0	0	5	9,2	54
4.	Program ini diterima oleh masyarakat	54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	54
5.	Program ini berdampak baik	6	11,1	2	3,7	40	74	1	1,8	5	9,2	54
6.	Program ini berjalan lancar	6	11,1	2	3,7	41	75,9	0	0	5	9,2	54

- Motivasi masyarakat dengan adanya Program PEMP

Tingkat Pemberdayaan masyarakat nelayan salah satunya dengan motivasi dari diri masyarakat seperti keterlibatan dalam suatu organisasi dan lamanya jam kerja masyarakat yang dilakukan. Pada nilai motivasi ini, 54 orang (100%) masyarakat bekerja tidak sesuai dengan jam kerja biasanya (8 jam/hari). Karena lamanya kerja tergantung pada hasil tangkapan yang diperoleh. Jika hasil tangkapan telah memenuhi, maka mereka pulang dari melaut. Tetapi jika hasil tangkapan kurang, maka lamanya kerja/melaut bisa melebihi 8 jam/hari. Sedangkan untuk motivasi dalam berorganisasi, masyarakat kurang begitu mengenal tentang organisasi dan 100% masyarakat tidak ada yang mengikuti suatu organisasi ataupun kepengurusan dalam organisasi. Dari penilaian ini, maka dapat dikatakan bahwa program ini tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga menunjukkan bahwa program tersebut tidak berpengaruh terhadap motivasi masyarakat. Motivasi masyarakat dengan

adanya Program PEMP berdasarkan skor yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Motivasi masyarakat dengan adanya Program PEMP

No	Pertanyaan	Jawaban										Jumlah
		SS (4)	%	S (3)	%	KS (2)	%	TS (1)	%	TT (0)	%	
1	Maksimal bekerja 8 jam/hari	0	0	0	0	54	100	0	0	0	0	54
2	Sering bekerja lembur (>8 jam)	0	0	0	0	54	100	0	0	0	0	54
3	Keinginan berorganisasi	0	0	0	0	0	0	54	100	0	0	54
4	Keterlibatan dalam suatu organisasi	0	0	0	0	0	0	54	100	0	0	54
5	Keinginan menjadi pengurus dalam organisasi	0	0	0	0	0	0	54	100	0	0	54
6	Organisasi yang diikuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54

▪ Kesejahteraan Masyarakat

Dilihat dari kesejahteraan masyarakat dimana dinilai dari respon masyarakat terhadap dampak yang diperoleh dari program PEMP tentang pendidikan, penghasilan, kesehatan dan akses, maka sebagian besar masyarakat menilai bahwa adanya program PEMP tersebut tidak berpengaruh pada pendapatan, pendidikan, kesehatan dan akses yang mereka peroleh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendapatan mereka tergantung pada hasil tangkapan yang didapat. Jika tidak ada hasil, maka tidak ada uang/penghasilan yang didapat. Rata-rata pendapatan nelayan juragan sebelum dan setelah adanya program PEMP yang diperoleh sebesar Rp. 5.389.250/bulan. Sedangkan pada nelayan pandega, rata-rata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 786.985,8/bulan. Pendapatan mereka berubah bukan karena

adanya program PEMP akan tetapi karena kondisi laut. Hampir semua nelayan mengatakan bahwa:

"Nelayan itu sebenarnya kaya mbak... tapi, nelayan itu royal. Ada uang banyak (hasil tangkapan banyak), dalam sehari langsung habis karena berpesta. Gak ada kata menabung. Kalau gak ada uang (tidak ada hasil/tidak ada ikan), ya hari itu juga ngutang (hutang). Bayar kalau ada uang. Pinjaman dana itu hanya untuk modal melaut saja".

Masyarakat juga mengatakan bahwa pinjaman dana itu tidak berpengaruh pada pendidikan untuk anaknya. Sejak dahulu hingga sekarang mereka akan terus membiayai anaknya sekolah meskipun tidak ada atau dengan adanya program PEMP. Mereka tetap berfikir bahwa pendidikan sangat penting baginya mereka/anak mereka meskipun sebagai nelayan. Paling tidak, pendidikan yang dicapai melebihi orang tuanya. Bagi masyarakat nelayan, program PEMP tidak berpengaruh terhadap pendidikan putra/putri mereka. Hanya saja sebagian besar mereka menyekolahkan anaknya hingga lulus SMP. Apalagi dengan bebasnya biaya sekolah sampai SMP.

Begitu pula untuk tingkat kesehatan dan akses masyarakat nelayan. Program ini tidak berpengaruh terhadap kesehatan dan akses mereka ke Rumah Sakit (RS) atau ke puskesmas. Meskipun penghasilan mereka bertambah, tetapi tetap saja pola makan mereka tidak berubah. Kesehatan mereka juga bukan tergantung pada ada/tidaknya program PEMP. Semuanya tergantung pada kondisi tubuh mereka sendiri. Begitu juga dengan akses ke Rumah Sakit/puskesmas. Akses ke RS/puskesmas sama halnya dengan masyarakat lain. Meskipun ada/tidak ada program PEMP ini, akses ke RS/puskesmas tetap lancar dan harganya pun sama dengan masyarakat lainnya. Kecuali untuk masyarakat tidak mampu yang memiliki Jamkesmas.

Penjelasan di atas mengungkapkan bahwa (>45) orang (84,8%) masyarakat menilai Program PEMP tidak berpengaruh pada pendapatan, pendidikan, kesehatan maupun akses. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

program ini tidak mempengaruhi pendapatan, pendidikan, kesehatan dan akses masyarakat nelayan. Kesejahteraan dan akses masyarakat berdasar skor yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Kesejahteraan Masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban										Jumlah
		SS (4)	%	S (3)	%	KS (2)	%	TS (1)	%	TT (0)	%	
1	Pendapatan meningkat dengan adanya Program PEMP	0	0	0	0	0	0	49	90,7	5	9,2	54
2	Penghasilan yang diperoleh memenuhi kebutuhan keluarga setelah ada program PEMP	0	0	21	38,8	31	57,4	0	0	0	0	54
3	Masyarakat masih meminjam pada juragan	54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	54
4	Tingkat pendidikan mulai membaik	0	0	0	0	1	1,8	48	88,8	5	9,2	54
5	Putra/putri anda mendapatkan pendidikan yang layak	0	0	0	0	1	1,8	48	88,8	5	9,2	54
6	Tingkat kesehatan nelayan semakin membaik	0	0	0	0	6	11,1	43	79,6	5	9,2	54
7	Pola makan/gizi masyarakat yang semakin baik	0	0	0	0	1	1,8	48	88,8	5	9,2	54
8	Akses ke rumah sakit/puskesmas mudah	0	0	0	0	3	5,5	46	85,1	5	9,2	54

- **Partisipasi Masyarakat**

Untuk tingkat pemberdayaan masyarakat nelayan dilihat dari partisipasinya dalam program tersebut, diperoleh 49 orang (90,7%) masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut dengan tidak ada paksaan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini ditunjukkan dengan musyawarah yang dilakukan atas pengamblan keputusan tentang

pengembalian pinjaman dana PEMP. Partisipasi masyarakat berdasarkan skor yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Partisipasi masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban										Jumlah
		SS (4)	%	S (3)	%	KS (2)	%	TS (1)	%	TT (0)	%	
1	Ikut serta dalam pelaksanaan Program Kesukarelaan	49	90,7	0	0	0	0	0	0	5	9,2	54
2	dalam berpartisipasi Keikutsertaan	49	90,7	0	0	0	0	0	0	5	9,2	54
3	tidak ada paksaan Ikut serta dalam pengambilan keputusan	49	90,7	0	0	0	0	0	0	5	9,2	54
4		49	90,7	0	0	0	0	0	0	5	9,2	54

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka pada intinya Program ini tidak berjalan lancar, tidak merata dan tidak ada dampak yang berarti bagi masyarakat nelayan karena pinjaman dana dari Program PEMP itu, hanya digunakan sebagai modal melaut bagi nelayan.

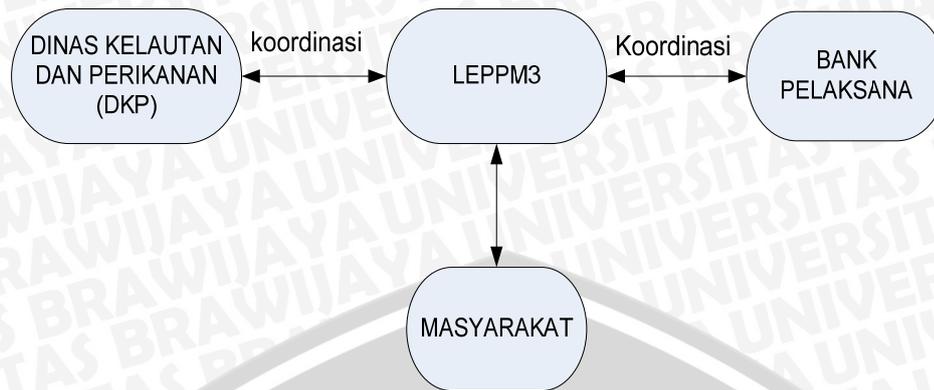
5.5 Model Pemberdayaan Yang Sesuai Bagi Masyarakat Nelayan

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat seperti pada Program PEMP di Kabupaten Situbondo ini.

Program Pemberdayaan Masyarakat nelayan merupakan salah satu kegiatan pembangunan daerah yang sedang dikembangkan oleh pemerintah

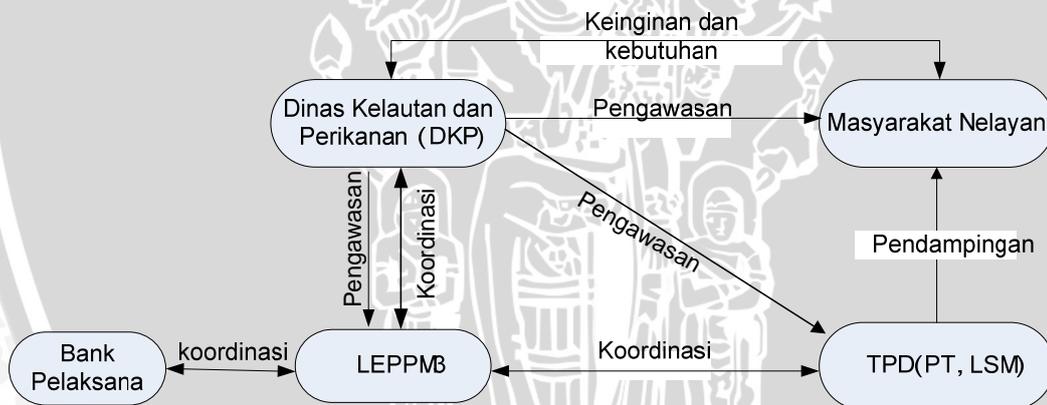
khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan, yang didasari oleh besarnya potensi pesisir yang belum dimanfaatkan secara optimal. Masalah yang paling utama pada penelitian ini adalah Apakah program yang digulirkan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan nelayan? karena itu penelitian ini akan menjawab bentuk model pengembangan program yang akan menggabungkan antara keinginan dan kebutuhan dari semua unsur yang terkait.

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa, Program ini tidak berjalan lancar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Departemen Kelautan dan Perikanan). Ini dilihat dari model pemberdayaan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo seperti hanya pada pemberian pinjaman dana dan SPDN saja serta penilaian atas Program PEMP (sasaran, pendekatan, prinsip dan pendampingan) yang tidak sesuai dengan pedoman. Selain itu juga dilihat dari tingkat pemberdayaan masyarakat mengenai motivasi yang kurang, pendidikan, kesehatan, akses dan pendapatan yang semua itu tidak berpengaruh (tidak mengalami perubahan) meskipun dengan adanya program PEMP tersebut. Seperti halnya juga pada kecenderungan nelayan meminjam pada tengkulak serta pola pikir masyarakat yang masih rendah. Ini juga disebabkan dengan kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat nelayan. Serta tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), sehingga menimbulkan adanya unsur KKN yang dilakukan oleh pihak LEPPM3 yang menyebabkan tidak bergulirnya pinjaman dana tersebut. Jika dilihat dari penjelasan di atas maka *flow chart* model pemberdayaan masyarakat nelayan yang digunakan oleh DKP dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Dari pembahasan dan model di atas, peneliti akan menjawab bentuk model pengembangan program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan yang sesuai bagi masyarakat nelayan. Dimana Model yang diberikan harus benar-benar menyentuh langsung pada masyarakat. Model pengembangan dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Model Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Pada Model tersebut, hal yang paling utamma adalah dengan menggabungkan antara keinginan dan kebutuhan dari semua unsur yang terkait. Sehingga program ini tidak terpusat pada pinjaman dana saja seperti pada bantuan alat tangkap, pinjaman dana untuk membeli perahu ataupun lainnya yang nantinya masyarakat tidak tergantung lagi pada juragan dan juga kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Tidak hanya dari keinginan masyarakat saja, tetapi perlu adanya kesadaran masyarakat dengan sosialisasi atau

penyuluhan-penyuluhan sehingga masyarakat mengerti akan program yang diberikan dan yang nantinya dapat pula merubah pola pikir dari masyarakat. Kemudian, dari kebutuhan dan keinginan yang telah disepakati bersama, maka pihak DKP berkoordinasi dengan LEPPM3. Dimana LEPPM3 sebagai komponen utama pelaksana Program PEMP di daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan, koperasi/LEPPM3 harus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab operasional di daerah dan juga dengan lembaga perbankan sebagai mitra usaha. Selanjutnya LEPPM3 ini bertugas untuk mengadakan suatu sosialisasi tentang program yang akan dijalankan tersebut mulai pada tahap administrasi hingga pada pengguliran program ke kelompok lainnya.

LEPPM3 juga harus berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang merupakan tenaga profesional di bidangnya yang bersedia tinggal di tengah masyarakat sasaran dan mendampingi masyarakat secara terus-menerus (selama kegiatan program) dengan memberikan penjelasan-penjelasan dan pengetahuan sehingga masyarakat paham/mengerti akan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) khususnya pada nelayan dan masyarakat tidak lagi merasa terbebani dengan pinjaman yang diberikan. Seperti pada pengembalian dana pinjaman. Hubungan antara LEPPM3 dengan masyarakat dan pendamping dengan masyarakat harus baik sehingga tidak ada sifat untuk menguasai tetapi peran LEPPM3 disini juga harus menanamkan kejujuran dan juga harus tegas dalam menjalankan tugas. Sedangkan untuk peminjaman dana, LEPPM3 disini juga harus memberikan batasan waktu pengembalian sesuai dengan besaran yang dipinjam. Selain itu juga diberikan kwitansi atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap nelayan yang telah membayar/mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan besar pengembalian sehingga jika nantinya terjadi kecurangan dalam

proses pengembalian dana PEMP dapat diproses secara hukum sehingga dana dapat bergulir ke kelompok lain/masyarakat nelayan lain. Selain itu, LEPPM3 dan TPD juga berkewajiban memberikan penyuluhan-penyuluhan betapa pentingnya SDA disekitar masyarakat dan betapa pentingnya Program PEMP ini dijalankan. Pendampingan dan penyuluhan yang sering dilakukan juga nantinya akan berpengaruh terhadap kecendrungan mereka pada juragan. Sehingga masyarakat tidak lagi tergantung pada peran juragan.

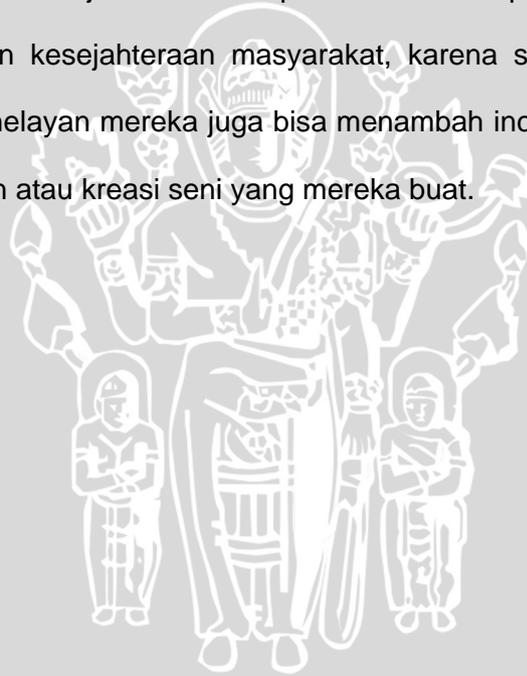
Dari menggabungkan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut, maka program ini akan berjalan lancar dan dapat diterima oleh masyarakat karena dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk motivasi dan respon yang awalnya kurang baik, akan menjadi masyarakat akan memiliki motivasi dan respon yang tinggi akan adanya program pemberdayaan tersebut.

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai penanggungjawab juga harus mengawasi jalannya Program PEMP tersebut. Dari pengawasan terhadap kepengurusan dan kinerja LEPPM3, pengawasan terhadap TPD yang melakukan pendampingan sehingga masyarakat bisa menjalankan dan mengembangkan usaha sampai pada proses pemasaran dan hingga pengawasan terhadap masyarakat nelayan apakah Program (pinjaman dana) tersebut telah diterima oleh masyarakat nelayan. Selain itu, DKP juga harus mengawasi jalannya pengembalian dana pinjaman. Dengan model pengembangan yang diberikan tersebut, maka jalannya Program PEMP akan lancar.

Tidak hanya pinjaman dana yang diberikan tetapi model tersebut juga dapat berupa pemanfaatan terhadap sumberdaya yang ada termasuk Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sumberdaya Alam (SDA) seperti dengan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir lewat Ekowisata. Ekowisata merupakan suatu kegiatan wisata yang yang memanfaatkan sumber-sumber

alam atau daerah-daerah yang relatif belum berkembang (sekaligus dengan budaya aslinya) yang bercirikan untuk mempromosikan konservasi alam, memberikan dampak sesedikit mungkin terhadap lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Apa pun alasannya, pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai pelaku pariwisata sangat penting selain untuk menunjukkan identitas lokal. Selain itu, pemberdayaan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang selama ini hidup di bawah garis kemiskinan. Jika masyarakat pesisir bisa diberdayakan khususnya kegiatan pariwisata seperti membentuk kelompok industri kerajinan rumah tangga membuat kerajinan baik berupa makanan maupun kreasi seni. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena selain memperoleh penghasilan sebagai nelayan mereka juga bisa menambah income keluarga dari hasil menjual makanan atau kreasi seni yang mereka buat.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir khususnya bagi nelayan di Kabupaten Situbondo, dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Dalam pelaksanaan Program PEMP, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu sasaran program, pendekatan program, prinsip dan pengembangan program, serta pendampingan.
2. Model Pemberdayaan yang dilakukan DKP tidak melibatkan peran TPD sebagai fasilitator. Model pemberdayaan ini juga hanya pada pinjaman dana saja.
3. Pada tahun 2001-2003, program PEMP berjalan lancar. Tetapi untuk tahun berikutnya hingga sekarang, Program ini tidak berjalan karena pengembalian yang belum lunas dari masyarakat. Sehingga dana pinjaman itu tidak bergulir lagi.
4. Prinsip pengelolaan dan pengembangan program PEMP tidak semua sesuai dengan yang direncanakan. Tidak semua masyarakat nelayan yang mendapat bantuan dari program PEMP ini. Khususnya pada masyarakat nelayan miskin atau pada nelayan pandega (tidak punya kapal/perah).
5. Program PEMP juga tidak memberikan manfaat yang optimal pada kesejahteraan masyarakat nelayan, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan dan akses. Dana pinjaman dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir hanya sebagai modal bagi nelayan untuk melaut.

6. Model Pengembangan yang sesuai bagi masyarakat nelayan adalah dengan menggabungkan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat yang juga sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka beberapa saran berikut yang dapat dijadikan alternatif untuk pemberdayaan masyarakat nelayan yang lebih baik. Adapun saran tersebut antara lain:

1. Program Pemberdayaan ini akan lebih sesuai jika menggabungkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya pinjaman modal saja yang tidak berpengaruh pada kesejahteraan/perekonomian masyarakat nelayan. Tetapi berdasarkan keinginan dan kebutuhan tersebut yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan sehingga motivasi dan respon masyarakat akan semakin tinggi dengan adanya program yang diberikan.
2. Pengembangan Program akan lebih efektif bila melibatkan peran Pendamping (Perguruan Tinggi dan LSM) yang dapat menyadarkan masyarakat nelayan dengan kondisi yang ada sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat.
3. Program PEMP harus merata khususnya dengan mendahulukan masyarakat nelayan yang lebih membutuhkan.
4. Diberikan syarat dan ketentuan dalam peminjaman agar jika terjadi masalah dalam pengembalian dana, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Untuk Pemerintah, harus mengetahui masalah yang terjadi di masyarakat lebih dulu. Setelah itu menerapkan/membuat model yang sesuai bagi masyarakat nelayan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. 2001. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Agribisnis dan Agronomi Industri Dalam Upaya Penanggulangan Kerusakan Terumbu Karang.** <http://ferinaldy.wordpress.com/2008/04/24/pemberdayaan-masyarakat-pesisir/>. Di akses Oktober 2008.
- Aji, B Firman dan Sirait, MS. 1982. **Perencanaan dan Evaluasi (Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan).** PT. Bina Aksara. Jakarta
- Arikunto, S. 1998. **Manajemen Penelitian.** PT. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 215
- Arikunto, S. 2002. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V.** Rineka Cipta. Jakarta. Hal 107, 117, 126, 132, 213, 311
- Arikunto, S. 2006. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.** PT. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 131, 133, 134, 151.
- Fauzi A. 2005. **Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pembangunan Daerah.** <http://www.docstoc.com/docs/1825270/Penerapan-Prinsip-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pembangunan-Daerah>. Di akses Oktober 2008
- Kuncoro Mudrajad. 2001. **Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi.** AMP YKPN. Yogyakarta
- Kusumstanto, T. 2008. **Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Laut Dalam Abad XXI.** <http://www.englishland.or.id/xavier/perikanan01.pdf>. Di akses Oktober 2008
- Lababa, D. 2008. **Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.** <http://www.docstoc.com/docs/5576250/Monitoring-dan-Evaluasi-Kinerja-Pembangunan>. Di akses Oktober 2008
- Marzuki. 2005. **Metodologi Riset.** Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Mikkelsen, Britha. 2001. **Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan.** Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Moleong, L. 2005. **Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.** PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Nazir, M. 2005. **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesia. Bogor. Hal 360.

Partosuwiryo, M. 2003. **Pemberdayaan Perikanan Rakyat Melalui Manajemen Kelompok Usaha Bersama (KUB)**.
<http://www.englishland.or.id/xavier/pemberdayaan01.pdf>. Di akses Oktober 2008

Sandra. 2008. **Memberdayakan Industri Kecil Berbasis Agroindustri Di Pedesaan**. http://tumoutou.net/702_05123/sandra.htm. Di Akses Oktober 2008

Sedarmayanti dan Hidayat S. 2002. **Metodologi Penelitian**. Mandar Maju. Bandung

Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. **Metode Penelitian Survei**. Penerbit LP3ES. Jakarta

Sulistia et al. 1991. **Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial (Terjemahan)**. IKIP Semarang Press. Semarang

Sulistiyani, A. 2004. **Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan**. Gava Media. Yogyakarta.

Syarief E. 2001. **Pembangunan Kelautan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**.
<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=program+ekonomi+masyarakat+pesisir&btnG=Telusuri+dengan+Google&meta=&aq=f&oq=>. Di Akses Oktober 2008

Usman, H dan P. S. Akbar. 2006. **Metode Penelitian Sosial**. Bumi Aksara. Jakarta.

Winarsunu. 2007. **Statistik Dalam Penelitian Psikologi Dan Pendidikan**. Umm Pres. Malang.